

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2008**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :
DRS. H. ZULKIFLI, HA
NIM. 014946249

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008**

Penyusun TAPM : **Drs. H. ZULKIFLI, HA.**

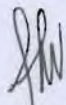
NIM : **014946249**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Hari/Tanggal :

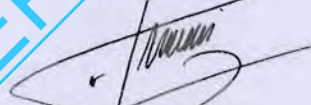
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Fatmawati, M.Si
NIP. 131913941

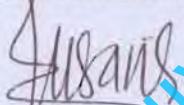
Pembimbing II,



Suciati, Ph.D
NIP.195202131985032001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winataputra
NIP. 194510071973021001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,.....

Yang Menyatakan



Drs. H. ZULKIFLI, HA.
NIM. 014946249

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **Drs. H. ZULKIFLI, HA.**
 NIM : **014946249**
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul TAPM : **ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BERAS
 UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI
 KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli :

Dr. Muharto Toha

Pembimbing I :

Dr. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II :

Suciati, Ph.D

ABSTRACT**Analysis of Subsidized Rice Program for The Poor (Raskin)
Policy in Sintang Regency in 2008****Drs. H.Zulkifli, H. A****Universitas Terbuka****zulkiflimap@yahoo.com**

Keyword : Implementation of Subsidized Rice Program for the Poor still needs the improvement of the distribution procedure, determining the amount of rice distribution and increased socialization

This research was conducted to determine whether the implementation of subsidized rice program for the poor in Sintang regency in 2008 had been able to be carried out as conditions apply. Studied aspects of this purpose are the implementation of the procedures for the distribution of rice aid to poor families and determining the amount of the distribution of rice aid to poor families in Sintang regency in 2008. The poor households who should receive the rice distribution program for poor families in Sintang regency were as many as 33.620 people with the amount of rice allocation per month of 336,200 kg. Each poor household had been designated as beneficiaries RASKIN rice might purchase a maximum of 10 kg for 12 months at a price of Rp. 1.600,00 /kg at the point of distribution in cash.

This research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is a research which aims to obtain the description of systematic, factual and accurate statement of facts occurred in the field. Meanwhile, the qualitative approach is the research procedure that produces the descriptive data in the form of the words – the written words or the impression and behavior of people observed. The qualitative method in principle has the same goal with the point of view which illustrates that the qualitative method approach is descriptive in form.

The research subjects are the head of National Procurement Corporation (PERUM BULOG) Sub Divre Region III Sintang, the head of Central Bureau of Statistics Sintang, the head of Secretariat Ekbang Sintang, the head of sub-district, the head of village and the poor household (RTM) as the target rice recipient of rice program for poor families in Sintang regency. The determination of the amount of the target rice recipient of rice program for poor families was conducted purposively which is the informants predetermined.

The research result showed that the goal achievement of the aid rice distribution for the poor families in Sintang regency had not been optimal yet. From the research result known that almost the entire success indicators of the RASKIN program had not been carried out in accordance with stipulations. From the indicators on target, it was found that the beneficiaries were not considered the poor households. From the appropriate indicators of the amount, there still exists the number of RASKIN rice was not received in accordance with the assigned number in one year, receiving rations of rice was not up to 12 times. From the fixed price indicators, it had not also been done because the price to the distribution point had been agreed over Rp. 1.600,00 /kg. From the findings, it was also known that the public complaints of complaints, criticisms and suggestions for the improvements to the implementation of RASKIN program never responded to and acted upon.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK**Analisis Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2008****Drs. H. Zulkifli, HA.****Universitas Terbuka****zulkiflimap@yahoo.com**

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin, masih perlu adanya penyempurnaan tata cara penyaluran, penentuan jumlah penyaluran beras dan peningkatan sosialisasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 sudah dapat terlaksana sebagaimana ketentuan yang berlaku. Aspek yang diteliti dari tujuan tersebut adalah mengenai pelaksanaan Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin serta Penentuan Jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Rumah tangga miskin yang seharusnya menerima pendistribusian program beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 33.620 orang dengan jumlah Pagu Raskin Per Bulan sebesar 336.200 kg. Setiap rumah tangga miskin telah ditetapkan sebagai penerima manfaat diperkenankan membeli beras RASKIN Maksimal 10 kg selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600,00/Kg di titik distribusi secara tunai.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan titik pandang yang menggambarkan bahwa pendekatan metode kualitatif tersebut adalah berbentuk deskriptif.

Subjek penelitian adalah Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM)

sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang. Penentuan jumlah Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin tersebut dilakukan secara purposif yaitu informan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan, pencapaian tujuan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang belum optimal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hampir seluruh indikator keberhasilan program raskin belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari indikator tepat sasaran, masih ditemui penerima manfaat bukan dikategorikan rumah tangga miskin. Dari indikator tepat jumlah, masih adanya jumlah beras raskin yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan jumlah yang sudah ditetapkan dalam satu tahun, penerimaan jatah beras tidak sampai 12 kali. Dari indikator tetap harga, juga belum terlaksana, karena harga yang sampai ke titik distribusi yang telah disepakati melebihi Rp. 1.600,00/Kg. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin tidak pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti.

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan penulis mendapatkan syafaat Rasullulah.

Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Penulis menyadari ketidak sempurnaan dari penulisan ini, karena hasil yang dicapai melalui Tesis ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapat. Oleh sebab itu penulis dengan lapang dada berkenan menerima segala keritikan yang sifatnya membangun, sehingga akan tercapai kesempurnaan untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Udin S. Winataputra selaku Direktur Proram Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

2. Ibu Dra. Susanti, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program Magister Administrasi Publik) Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
3. Bapak Ir. Edward Zubir, M.M selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Ibu Dr. Tafmawati, M.Si selaku Pembimbing Pertama Penulis Tesis ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan *saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini.*
5. Ibu Suciati, Ph.D selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
8. Bapak Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan

8. Bapak Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
9. Kepada ERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian Tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amat baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT.
Amin

Sintang, Desember 2009

Penulis



Drs. H. ZULKIFLI, HA.
NIM. 014946249

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
A. Otonomi Daerah Dan Kebijakan Publik.....	9
B. Kerangka Berpikir.....	26
C. Defenisi Konsep	28
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 32
A. Desain Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Prosedur Pengumpulan Data	33
D. Metode Analisis Data.....	34
E. Lokasi Penelitian.....	35
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	 37
A. Profil Kabupaten Sintang.....	37
B. Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008.....	 47
1. Tata Cara Pengorganisasian.....	47
2. Tata Cara Distribusi.....	66
3. Indikator Keberhasilan	73
4. Pemantauan.....	76
C. Penentuan Jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008.....	 78
1. Jumlah Penduduk Miskin	78
2. Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat	 94

	3. Angkutan Untuk Penyaluran Beras Keluarga Miskin.....	99
BAB V	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	107
	LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1.1.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2007	2
Tabel 1.2.	Pagu Raskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008	4
Tabel 1.3.	Daftar Penentuan Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	5
Tabel 2.1.	Ukuran Kemiskinan Versi BKKBN	20
Tabel 4.1.	Penduduk Kabupaten Sintang Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Dan Jenis Kelamin Tahun 2008	40
Tabel 4.2.	Luas Panen Dan Produksi Tanaman Pangan Dan Palawija Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	41
Tabel 4.3.	Populasi Ternak Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	42
Tabel 4.4.	Luas Panen Dan Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	43
Tabel 4.5.	Perkembangan PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Lima Tahun Terakhir	45
Tabel 4.6.	Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Lima Tahun Terakhir	46
Tabel 4.7.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	49
Tabel 4.8.	Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	54
Tabel 4.9.	Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2007	62
Tabel 4.10.	Titik Distribusi Raskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2007	67
Tabel 4.11.	Indikator Keberhasilan Program Raskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	74

Tabel 4.12.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Serawai Tahun 2008	81
Tabel 4.13.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ambalau Tahun 2008	82
Tabel 4.14.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008	83
Tabel 4.15.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sepauk Tahun 2008	84
Tabel 4.16.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Tempunak Tahun 2008	85
Tabel 4.17.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2008	86
Tabel 4.18.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sintang Tahun 2008	87
Tabel 4.19.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Dedai Tahun 2008	88
Tabel 4.20.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2008	89
Tabel 4.21.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kelam Permai Tahun 2008	90
Tabel 4.22.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2008	91
Tabel 4.23.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2008	92
Tabel 4.24.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008	93
Tabel 4.25.	Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2008	94

Tabel 4.26.	Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan Sumber Datanya Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	96
Tabel 4.27.	Realisasi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	98
Tabel 4.28.	Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	100

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi (Daftar Chek List) Untuk Pengamatan Lapangan
- Lampiran 2 Rangkuman Transkrip Hasil Wawancara Dengan Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang
- Lampiran 3 Rangkuman Transkrip Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang
- Lampiran 4 Catatan Hasil Wawancara Terhadap Warga Penerima Manfaat Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang
- Lampiran 5 Daftar Nama Informan
- Lampiran 6 Peta Wilayah Kabupaten Sintang
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian dari UPBJJ-UT Pontianak
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- Lampiran 9 Foto-Foto Penelitian
- Lampiran 10 Biodata

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda pokok pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2006-2010 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera. Makna masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera adalah masyarakat yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi, serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera tersebut, maka selama periode 2006 - 2010 akan dilaksanakan beberapa sub-agenda yang meliputi: penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang masih menghadapi masalah. Menurut Bappeda Kabupaten Sintang (2005: 72) permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Hasil dari upaya pengentasan/penanggulangan kemiskinan belum optimal. jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi (32,47%).
2. Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*) semakin meningkat. PGI dan DSI sebesar 0,97 dan 0,19 tahun 2003, bertambah menjadi 2,22 dan

0,54 tahun 2004. Garis kemiskinan pada kurun waktu yang sama meningkat dari Rp.117.268 menjadi Rp.132.380 per kapita per bulan.

- Status sosial ekonomi penduduk miskin semakin menurun. Prosentase penduduk miskin yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD bertambah dari 55,92% tahun 2003 menjadi 63,03% tahun 2004. Prosentase penduduk miskin yang tidak bekerja bertambah dari 2,58% tahun 2003 menjadi 6,51% tahun 2004. Prosentase pengeluaran untuk makanan meningkat dari 71,00 menjadi 74,57 persen pada tahun yang sama.

Tabel 1.1. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Penduduk	Penduduk Miskin	Prosentase (%)	KK
1	Serawai	21.215	11.441	53,93	3.408
2	Ambalau	14.085	5.179	36,77	1.913
3	Kayan Hulu	21.696	7.328	33,78	2.257
4	Kayan Hilir	23.010	6.181	26,86	2.327
5	Sepauk	41.563	9.336	22,46	2.869
6	Tempunak	24.016	8.358	34,80	2.738
7	Sungai Tebelian	26.037	5.036	19,34	1.714
8	Sintang	51.398	6.863	13,35	1.738
9	Dedai	24.779	9.107	36,75	2.864
10	Kelam Permai	14.086	7.002	49,71	2.219
11	Binjai Hulu	10.650	3.979	37,36	1.324
12	Ketungau Hilir	19.083	6.965	36,50	2.270
13	Ketungau Tengah	25.572	12.741	49,82	3.434
14	Ketungau Hulu	18.228	9.387	51,50	2.528
Kabupaten		335.418	108.903	32,47	33.603

Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang, 2008

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2007 yaitu sebesar 108.903 jiwa penduduk miskin (32,47%) atau 27.117 kepala keluarga miskin. Dalam upaya membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk memenuhi kebutuhan pokok pangannya, telah dikeluarkan kebijakan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.

Jumlah Pagu RASKIN untuk Kabupaten Sintang pada Tahun 2008 telah ditetapkan Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 1051 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 Perihal Penunjukan Personil Tim Beras Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008. Dalam Keputusan tersebut telah ditetapkan Pagu Raskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 yang memuat jumlah Rumah Tangga Miskin, Kuantum/Bulan, serta Kuantum untuk 10 bulan penyaluran.

Pagu Raskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2. Pagu Raskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	Pagu Raskin Tahun 2008		
		RTM	Kuantum/Bulan (kg)	Kuantum /Kg (10 bulan penyaluran)
1	Kota Pontianak	19.832	198.320	1.983.200
2	Kabupaten Pontianak	74.008	740.080	7.400.800
3	Kabupaten Landak	40.077	400.770	4.007.700
4	Kota Singkawang	14.062	140.620	1.406.200
5	Kabupaten Sambas	33.657	336.570	3.365.700
6	Kabupaten Bengkayang	16.884	168.840	1.688.400
7	Kabupaten Ketapang	33.485	334.850	3.348.500
8	Kabupaten Kayong Utara	11.953	119.530	1.195.300
9	Kabupaten Sintang	33.620	336.200	3.362.000
10	Kabupaten Melawi	14.835	148.350	1.483.500
11	Kabupaten Sanggau	31.570	315.700	3.157.000
12	Kabupaten Sekadau	13.441	134.410	1.344.100
13	Kabupaten Kapuas Hulu	23.464	234.640	2.346.400
Jumlah		360.888	3.608.880	36.088.800

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, 2008

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 1051 Tahun 2007 tersebut, selanjutnya untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 954 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima pendistribusian program beras untuk keluarga miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Adapun daftar penentuan jumlah rumah tangga miskin yang menerima pendistribusian program beras untuk keluarga miskin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Daftar Penentuan Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Kecamatan	Pagu Raskin Per Bulan		
		RTM	Kuantum/Bulan (kg)	Kuantum /Kg (10 bulan penyaluran)
1.	Sintang	1.750	17.500	175.000
2.	Kelam Permai	2.219	22.190	221.900
3.	Binjai Hulu	1.324	13.240	132.400
4.	Sungai Tebelian	1.714	17.140	171.400
5.	Dedai	2.864	28.640	286.400
6.	Kayan Hilir	2.327	23.270	232.700
7.	Kayan Hulu	2.260	22.600	226.000
8.	Sepauk	2.871	28.710	287.100
9.	Ketungau Hilir	2.270	22.700	227.000
10.	Ketungau Tengah	3.434	34.340	343.400
11.	Ketungau Hulu	2.528	25.280	252.800
12.	Tempunak	2.738	27.380	273.800
13.	Serawai	3.408	34.080	340.800
14.	Ambalau	1.913	19.130	191.300
Jumlah		33.620	336.200	3.362.000

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Dari data di atas, jumlah rumah tangga miskin yang menerima pendistribusian program beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 33.620 orang dengan jumlah Pagu Raskin Per Bulan sebesar 336.200 kg. Setiap rumah tangga miskin telah ditetapkan sebagai penerima manfaat diperkenankan membeli beras RASKIN Maksimal 10 kg selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600,00/Kg di titik distribusi secara tunai.

Hanya saja, dalam merealisasikan jumlah Pagu Raskin Per Bulan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain, penyaluran

raskin hanya sampai di Titik Distribusi yaitu Ibukota Kecamatan. Selanjutnya Pembiayaan dari Titik Distribusi ke masing-masing Rumah Penerima Manfaat adalah menjadi beban dan tanggung jawab Penerima Manfaat (Rumah Tangga Miskin) yang bersangkutan. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan mengalami penambahan dari harga Rp. 1.600,00/kg di titik distribusi secara tunai.

Mengenai alur distribusi, titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satuan Kerja (SATKER) RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Desa yang dapat ditinjau oleh Penerima Manfaat Program Beras RASKIN, atau Lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara Tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang. Satuan Kerja (SATKER) RASKIN adalah Satuan Kerja Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang yang bertugas dan bertanggungjawab mengangkut Beras dari Gudang Beras Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang sampai dengan Titik Distribusi yang telah disepakati dan meyerahkan kepada Pelaksana Distribusi. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang ditunjuk oleh Camat, Lurah/Desa, dibantu oleh Anggota Masyarakat, atau Institusi Ekonomi Kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan Beras kepada Penerima Manfaat Program Beras RASKIN.

Selain permasalahan distribusi di atas, permasalahan lainnya adalah, terjadinya perbedaan data jumlah masyarakat miskin yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten dan BPS dengan jumlah masyarakat miskin yang terdata pada Pemerintah Desa setempat. Sehingga banyak rumah tangga miskin yang menuntut untuk mendapat raskin, sedangkan pagu yang ada jumlahnya terbatas. Sehubungan dengan itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008?" Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, penulis menjabarkannya dalam pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008?
2. Bagaimanakah penentuan jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Penentuan Jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian ilmiah dan wawasan teoritis pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada aspek implementasi kebijakan dan manajemen pelayanan public tentang penyaluran Raskin.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kecamatan, Desa, masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah Dan Kebijakan Publik

Salah satu wujud konkrit penggunaan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dimiliki daerah otonom adalah mengelola kebijakan publik baik merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Pada dasarnya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah (pemerintah daerah) kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik (Easton dalam Islamy, 1988:1.9, Dye dalam Thoha. 1993 : 60). Jika mengacu pada pengertian kebijakan publik seperti di atas maka terlihat keterkaitan erat antara otonomi daerah dan kebijakan publik. Disatu sisi keberadaan otonomi daerah adalah payung politik bagi daerah untuk mengelola kebijakan publik secara mandiri. Sedangkan pada sisi lain pengelolaan kebijakan publik yang mandiri adalah bentuk nyata dari implementasi otonomi daerah dalam tataran operasional. Dari pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan otonomi daerah akan sangat ditentukan sejauhmana daerah otonom memiliki kemampuan mengelola kebijakan publik baik dari aspek perumusan, implementasi maupun evaluasinya.

Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi. Lazimnya Implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program (Jones, 1991: 296). Kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991: 295) bahwa implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 110) adalah model proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber-sumber kebijakan, (3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (4) Karakteristik badan pelaksana, (5) Kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik, (6) Kecendrungan Pelaksana (*Implementor*) serta (6) Pencapaian.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan untuk mengidentifikasi indikator-indikator merupakan tahap krusial dalam analisis pelaksanaan kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Hal ini disebabkan bahwa tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena pelaksanaan tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Di samping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan yang juga perlu mendapat perhatian dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar pelaksanaan yang efektif.

Pelaksanaan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Oleh karena itu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan pelaksanaan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Karakteristik badan pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi itu sendiri. Dalam struktur birokrasi tersebut beberapa hal yang mungkin berpengaruh dalam mengpelaksanaankan kebijakan adalah: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, tingkat komunikasi, sumber-sumber politik, vitalitas,

serta kaitan formal dan informal dengan badan pelaksana keputusan maupun pembuat keputusan.

Dampak kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada beberapa aspek yang kiranya mendapat tekanan mengenai lingkungan sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi di mana pelaksanaan itu dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain: Apakah sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik dalam organisasi pelaksana cukup mendukung pelaksanaan yang berhasil dan sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik dipengaruhi oleh implemtasi kebijakan itu sendiri.

Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Terdapat beberapa unsur tanggapan pelaksana yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap penerimaan, netralitas, penolakan dan instensitas tanggapan terhadap kebijakan.

Suatu kebijakan negara yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik belaka tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dalam proses perumusan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui beberapa

tahap dimulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan.

Sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter Dan Van Horn di atas, menurut Thamrin (1997:59) dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab adalah:

1. Bagaimana kebijakan diimplementasikan ?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut ?
3. Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan itu ?
4. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa ?
5. Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ?
6. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan?
7. Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ?

Menurut Dye (Wahab, 1997:2), kebijaksanaan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari defenisi tersebut di atas, konsekuensinya adalah kebijakan publik itu lebih banyak mengedepankan peran negara atau pemerintah. Anderson (Wahab, 1997:3) menyatakan kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Anderson, (Wahab, 1997:3) implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

- (1) bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijaksanaan

itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Nugroho, (2003:34) dasar kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama antara legislatif dengan eksekutif adalah Undang-Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Secara khusus, di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat darurat, maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang bersifat sementara sampai Undang-Undang dibuat. Bahkan, di Indonesia, yang mengesahkan Undang-Undang adalah Presiden. Undang-Undang sendiri disahkan setelah ada persetujuan legislatif dan eksekutif (Presiden).

Kebijakan lainnya adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena dengan semakin meningkatnya

kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Kebijakan tersebut dalam berbagai Peraturan Pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Keputusan Kepala Daerah, dan seterusnya. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat yaitu: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen) atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan seterusnya. Di tingkat daerah, yang ada adalah Keputusan Gubernur, dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya; Keputusan Bupati, dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa dalam kurun waktu Tahun 2004 – 2009 telah ditetapkan misi yang menjadi sasaran, antara lain sebagai berikut.

1. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi agenda utama yang dicanangkan oleh pemerintah. Kesadaran seperti ini lahir karena adanya pemahaman bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat berbahaya. Kemiskinan bukan hanya melemahkan potensi individu dan masyarakat untuk berkembang, pemicu keresahan dan gejolak sosial, ketergantungan dan eksploitasi dari satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial lainnya, juga yang lebih penting adalah sangat efektif menurunkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kebanyakan para ahli telah memberikan pengertian kemiskinan dengan perspektif yang beragam sehingga hasilnya juga melahirkan pengertian yang beragam. Menurut Soedarno (Jurnal SMERU Volume 11 Juli-September 2004) kemiskinan adalah “ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya, bahkan kebutuhan fisik minimumnya. Deutch (dalam Sumardi dan Evers, 1982:5) memahami arti kemiskinan sebagai kurang dimilikinya secara layak hal-hal yang dihargai tinggi oleh individu atau masyarakat.

Berdasarkan Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten Sintang (Bappeda Kabupaten Sintang, 2005:25) defenisi lain menyebutkan, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pengertian yang lebih operasional dinyatakan oleh Ghose dan Griffin (Sumardi dan Evers, 1982:7) yang memformulasikan arti kemiskinan yakni kelaparan, kekurangan gizi, pakaian dan perumahan tidak memadai, pendidikan rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan memperoleh bebagai pelayanan sosial yang ada.

Berbagai pengertian kemiskinan tersebut di atas, maka terdapat kesamaan makna bahwa kemiskinan merupakan kondisi berhubungan dengan kekurangan tentang kebutuhan dasar yang semestinya dipenuhi. Pengertian kemiskinan seperti di atas memiliki konsep utama yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Yang dimaksud KHM yakni suatu batas kebutuhan dasar yang dapat membuat seseorang atau sekelompok orang hidup secara wajar/layak dalam kehidupan sosial tertentu. KHM bersifat relatif, artinya berlaku secara spesifik di wilayah

tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat upah, harga dan lain-lain.

Dilihat dari jenisnya, KHM menurut pandangan para ahli meliputi beberapa hal yaitu : Makanan, Pakaian, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, Kebersihan, Transportasi serta Partispasi masyarakat (Sumardi dan Evers, 1982:vi). Untuk mengukur KHM memang relatif sulit, salah satu yang dipakai dengan menggunakan tingkat pendapatan/penghasilan seseorang atau sekelompok orang sehingga kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi dalam jangka waktu tertentu (bulan) yang merupakan akumulasi penjumlahan dari beberapa kebutuhan pokok seperti di atas sebagai berikut : Makanan diukur 2 kali sehari per orang, Pakaian diukur memiliki 2 helai baju per orang, Perumahan diukur memiliki luas $3 \times 3 \text{ m}^2$, Kesehatan diukur dapat berobat ke puskesmas ketika sakit, Pendidikan diukur dapat mengenyam pendidikan sampai SD

Aspek penting dari kemiskinan adalah ukuran dan indikator operasional dari kemiskinan. Hingga saat ini telah banyak ahli atau lembaga mencoba membuat ukuran dan indikator kemiskinan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun di Indonesia versi dominan yang banyak dirujuk adalah versi Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak tahun 1976 misalnya, BPS menyusun ukuran dan indikator

kemiskinan yang dibedakan antara wilayah perdesaan, perkotaan dan propinsi di Indonesia.

Ukuran yang dipakai BPS, penduduk miskin ditentukan berdasarkan pengeluaran atas kebutuhan pokok, yang terdiri dari bahan makanan maupun bukan makanan yang dianggap “dasar“ dan diperlukan selama jangka waktu tertentu agar dapat hidup secara layak. Dengan cara ini, maka kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi perkapita di bawah suatu standar yang disebut sebagai garis kemiskinan.

Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan (1). Biaya untuk memperoleh sejumlah makanan dengan kandungan 2.100 kalori perkapita perhari dan (2) Biaya untuk memperoleh sejumlah bahan bukan makanan yang dianggap “dasar” seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan pendidikan.

Jika dinominalkan secara rupiah, ukuran versi BPS tentang garis kemiskinan pada tahun 1999 adalah Rp. 93.896/kapita/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp. 73.898/Kapita/bulan untuk daerah perdesaan. Sementara itu, menurut versi BKKBN ukuran kemiskinan dilihat dari keadaan keluarga beserta kondisi riil yang dimilikinya. Mengenai ukuran kemiskinan versi BKKBN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Ukuran Kemiskinan Versi BKKBN Tahun 2004

VARIABEL	KRITERIA MISKIN
Luas Lantai	< 8 M ² per kapita
Jenis lantai	Tanah
Air bersih	Air Hujan/ Sumber tidak tertampung
Jamban	Tidak punya
Asset	Tidak punya
Lauk pauk	Tidak punya/ Ada tidak bervariasi
Kegiatan sosial	Tidak pernah
Membeli pakaian	Tidak pernah

Sumber: Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten Sintang

Versi di atas memang sangat berguna untuk memahami kemiskinan dan selanjutnya merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Namun pengukuran yang dipakai masih bersifat umum dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, dalam upaya lebih memahami kemiskinan lebih akurat dan sesuai dengan konteks wilayah tertentu dua versi ini dikembangkan lebih lanjut sehingga lebih relevan dan realistis, dalam arti sesuai dengan kondisi lokal yang ada.

Kaum miskin dilihat sebagai manusia, yang juga bermartabat. Kerangka kebijakan, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kebijakan yang memihak mereka, tetapi suatu kebijakn yang mendasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka, sebagai manusia warganegara yang bermartabat. Anda harus bedakan, memposisikan manusia bermartabat (dipenuhi hak-hak dasarnya) tetapi sebagai obyek kebijakan; dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. Pernyataan kebijakan yang memihak (*pro poor*) jelas dipengaruhi ideologi charity, di mana kaum miskin diposisikan sebagai obyek. Perluasan

jargon “*pro poor*” ini hanyalah: partisipasi yang biasanya, ruang partisipasi kaum miskin itu diambil alih oleh organisasi non pemerintah, dan pemerintah pun biasanya cukup puas mendengar: “kami mewakili kaum miskin”. Memperhalus dalam arti, perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini banyak melibatkan unsur non-pemerintah, tetapi yang jelas tidak melibatkan kaum miskin itu sendiri.

Perspektif hak ini sesungguhnya memberi prinsip dasar dalam penanggulangan kemiskinan di masa depan, yakni pendekatan berbasis hak-hak dasar kaum miskin dalam program dan strategi penanggulangan kemiskinan. Ini menjadi inisiatif grand-strategy dari suatu paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki nilai dasar: penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin.

Telah menjadi pemahaman umum bahwa program dan strategi penanggulangan kemiskinan akan lebih berhasil maksimal jika melibatkan si miskin itu sendiri sebagai bagian dari seluruh proses. Namun tekanan sistem dan struktur yang dipelihara selama bertahun-tahun telah memaksa mereka kehilangan kepercayaan akan diri dan potensi dirinya. Kapabilitasnya dihancurkan sehingga mereka betul yakin bahwa mereka tiada hak dan berhak atas kehidupan yang lebih baik.

Memahami kemiskinan di suatu wilayah, ada sedikitnya dua faktor besar dalam menentukan indikator kemiskinan, yaitu faktor kemiskinan penduduk

(aspek manusia) dan faktor kemiskinan wilayah (aspek lingkungan fisik). Berdasarkan Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten Sintang (2005:25) strategi penanggulangan kemiskinan harus mengandung beberapa substansi sebagai berikut: (1) Penciptaan kapasitas/kekuatan sosial masyarakat miskin sehingga akan tumbuh produktifitas dan kreatifitas mereka mengatur diri sendiri termasuk dalam menyikapi kemiskinan, (2) Strategi membuka peluang atau kesempatan bagi orang miskin, (3) Strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat miskin, (4) Strategi melindungi masyarakat Miskin.

Untuk menciptakan kapasitas/kekuatan sosial masyarakat miskin sehingga akan tumbuh produktifitas dan kreatifitas mereka mengatur diri sendiri termasuk dalam menyikapi kemiskinan, maka sarana dasar yang harus dikembangkan yaitu: Pertahanan ruang hidup, Waktu Luang, Organisasi Sosial, Sarana dalam Pekerjaan dan Lingkungan dan Sumber Keuangan.

Strategi membuka peluang atau kesempatan bagi orang miskin dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin. Karena itu kebijakan dan Program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya : pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama kepada sektor informail yang menjadi tulang punggung masyarakat miskin.

Strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat miskin, karena kemiskinan sifatnya multidimensi, maka penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga memerlukan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan pada upaya untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembaga lembaga sosial, politik, dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Agar masyarakat miskin memiliki akses yang seluas luasnya terhadap berbagai lembaga di atas maka diperlukan *Pertama*; adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dari lembaga lembaga pemerintah, terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum dan pelayanan umum lainnya, *kedua*; harus ada keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi luas kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam tata pemerintahan agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan baik, yaitu : penghapusan birokrasi yang memakan waktu dan biaya, penghapusan korupsi, terutama korupsi dana penanggulangan kemiskinan, dan adanya koordinasi lintas lembaga dan pelaku. Sedangkan upaya pembinaan masyarakat miskin mencakup pembinaan manusia, usaha dan lingkungan diarahkan dapat mencapai kesejahteraan yang layak, mengembangkan sikap mandiri dengan semangat yang tinggi untuk membangun

kelurganya, menumbuhkan prilaku ekonomi keluarga yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten Sintang (2005) Strategi melindungi masyarakat Miskin terhadap dua hal yakni guncangan internal seperti kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK dan sebagainya maupun guncangan eksternal misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial sehingga tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi guncangan guncangan tersebut. Oleh karena itu sangat penting melindungi masyarakat miskin dari dua hal itu melalui upaya mengurangi sumber-sumber resiko guncangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi guncangan dan menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif.

Menurut Ashari (2003:45) bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar implemementasi kebijakan dapat efektif yaitu: (1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar implemementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin dapat efektif yaitu organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik, isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat

miskin, masyarakat mempunyai kepercayaan kepada organisasi pelaksana serta organisasi pelaksana harus selalu dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam pelayanan publik).

Handoko (2000:167) menyatakan bahwa proses pengorganisasian merupakan suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian. Menurut Handoko (2000:168) istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi.
- b. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seseorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.
- c. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para karyawan.
- d. Cara dalam mana manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut.

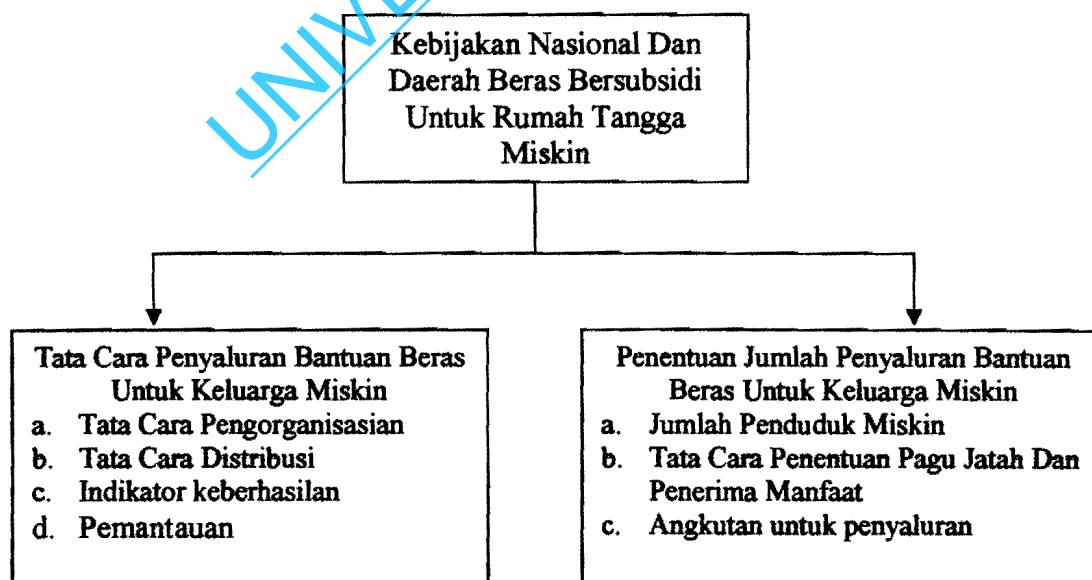
Dari pendapat di atas, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Menurut Handoko (2000:168) proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah yaitu: (1) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan, (2) pembagian beban pekerjaan yang secara logik dapat

dilaksanakan oleh anggota organisasi, dan (3) pengadaan serta pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Menurut Handoko (2000:169) bahwa proses ini akan tercermin pada struktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan pengorganisasian, yaitu: (1) pembagian kerja, (2) departementalisasi, (3) bagan organisasi formal, (4) rantai perintah dan kesatuan perintah, (5) tingkat-tingkat hirarki manajemen, (6) saluran komunikasi, (7) penggunaan komite, serta (8) rentang manajemen.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Guna memberikan arah dalam penelitian, terutama dalam proses pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitian, maka kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa Program Beras RASKIN untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan Program yang awalnya bersifat menyelamatkan Penduduk Miskin Rawan Pangan Tahun 1998 akan Krisis Pangan dan Ekonomi pada saat itu. Program tersebut dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sejalan dengan masih banyaknya jumlah Penduduk Miskin yang membutuhkan Bantuan Pangan, mengingat daya beli mereka rendah sebagian besar Pengeluarannya dibelanjakan untuk Konsumsi Pangan/Beras.

Pengorganisasian penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di tingkat Kabupaten secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian beras dari perum BULOG sampai ke titik distribusi yang telah disepakati maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya, adalah perum BULOG sesuai tingkat wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (SATKER) RASKIN.

Penerima Manfaat Program Beras RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan/Desa yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai Hasil Seleksi Musyawarah Kelurahan/Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Pada umumnya, Penerima Manfaat Program Beras RASKIN yaitu Rumah

Tangga Miskin (RTM) bermukim di pelosok-pelosok pedesaan yang sarana dan prasarana transporthasinya belum memadai.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitasnya Pelaksanaan Program RASKIN perlu disusun Rencana Distribusi yang meliputi Frekuensi, Kuantum dan Jadwal sesuai Kondisi Obyektif masing-masing wilayah dan dapat diatur dalam Petunjuk Teknis. Waktu Pendistribusian disesuaikan dengan Kondisi dan Kebutuhan Daerah setempat khususnya pada waktu Musim Pacekelik (diluar Musim Panen). Beras yang didistribusikan untuk Program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel Beras Untuk Keluarga Miskin dalam hal tidak terdapat persediaan Beras berlabel Beras Untuk Keluarga Miskin maka dapat menggunakan Persediaan Beras yang ada.

C. Defenisi Konsep

1. Konsep

- a. Konsep kebijakan publik dalam tulisan ini mengacu pada pendapat Easton (Islamy, 1988:1.9) serta Dye (Thoha. 1993 : 60) yang menyatakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah (pemerintah daerah) kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Implementasi kebijakan mengacu pada pendapat Jones (1991: 296) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program. Selanjutnya, mengenai istilah dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Kemiskinan merupakan kondisi berhubungan dengan kekurangan tentang kebutuhan dasar yang semestinya dipenuhi. Pengertian kemiskinan seperti di atas memiliki konsep utama yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Yang dimaksud KHM yakni suatu batas kebutuhan dasar yang dapat membuat seseorang atau sekelompok orang hidup secara wajar/layak dalam kehidupan sosial tertentu. KHM bersifat relatif, artinya berlaku secara spesifik di wilayah tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat upah, harga dan lain-lain
- c. Program Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah berupa strategi melindungi masyarakat Miskin dari *goncangan internal* seperti kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK dan sebagainya maupun *goncangan eksternal* misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial sehingga tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi goncangan goncangan tersebut. Oleh karena itu sangat penting melindungi masyarakat miskin dari dua hal itu melalui upaya mengurangi sumber-sumber resiko goncangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi goncangan dan menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif bagian dari pelayanan publik yang disediakan oleh organisasi pemerintah.

2. Istilah

a. Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

- 1) Tata Cara Pengorganisasian adalah mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengorganisasian dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin yang meliputi organisasi pelaksana dan tata kerja.
- 2) Tata Cara Distribusi adalah prosedur pelaksanaan kegiatan untuk menyalurkan beras keluarga miskin pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator keberhasilan adalah ukuran-ukuran mengenai keberhasilan dalam pelaksanaan program Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin
- 4) Pemantauan adalah kegiatan berupa monitoring dan pengendalian agar pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan

b. Penentuan Jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

- 1) Jumlah Penduduk Miskin adalah keseluruhan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sintang
- 2) Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat adalah mekanisme dan prosedur untuk menentukan jumlah beras miskin untuk masing-masing penerima manfaat pada setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang

- 3) Angkutan untuk penyaluran adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut Beras Untuk Keluarga Miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

Penelitian terhadap Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008 ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan titik pandang yang menggambarkan bahwa pendekatan metode kualitatif tersebut adalah berbentuk deskriptif

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber data primer adalah, Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang.

2. Sumber data sekunder adalah, dokumen-dokumen dari instansi ter
terutama dari PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, Badan
Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Bagian Ekbang Setda Kabupaten
Sintang, dan Camat.

C. Prosedur Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah:

1. Wawancara mendalam, yaitu melakukan tanya jawab melalui tatap muka secara langsung dengan yaitu, Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang. Penentuan Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebut dilakukan secara acak (*random*) dari data Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima beras Raskin yang ditetapkan oleh Bupati Sintang. Bentuk data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah data primer berupa penjelasan-penjelasan langsung dari informan.
2. Observasi yaitu pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Aspek-aspek yang diobservasi adalah, Tata Cara Pengorganisasian, Tata Cara Distribusi, capaian Indikator keberhasilan, kegiatan pemantauan, proses Penentuan Pagu Jatah serta

judul
t
palee
titik

jenis angkutan untuk penyaluran Beras Keluarga Miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang.

3. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data penduduk miskin, data penerima manfaat, data pagu jatah, data organisasi pelaksana, serta data penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan di atas, maka alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, yaitu sebagai panduan untuk menggali informasi, dimana pedoman wawancara ini tidak diberikan kepada informan, tetapi menjadi panduan peneliti untuk bertanya secara mendalam.
2. Pedoman Observasi/Daftar Ceklist yaitu pedoman observasi yang dipersiapkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Aspek-aspek yang dalam pedoman observasi ini adalah, pengamatan terhadap Tata Cara Pengorganisasian, Tata Cara Distribusi, capaian Indikator keberhasilan, kegiatan pemantauan, proses Penentuan Pagu Jatah serta jenis angkutan untuk penyaluran Beras Keluarga Miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang.

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka pengolahan dan analisa data yang digunakan

teknik analisis kualitatif. Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir adalah kesimpulan atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi).

E. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sintang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:

1. Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga Miskin termasuk yang paling besar yaitu 32,47% di antara 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
2. Kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai.
3. Dampak krisis global pada akhir tahun 2008 berpotensi melahirkan kemiskinan. Ekseks dari krisis ekonomi global di Kabupaten Sintang terlihat pada anjloknya harga komoditas produk unggulan daerah yaitu karet dan sawit. Penurunan harga tersebut melampaui angka 50% sehingga mengancam kehidupan para petani. Kondisi ini kemudian melahirkan kelesuan aktivitas produksi pada dua komoditas tersebut. Tahap selanjutnya, ekseks krisis keuangan global tersebut melahirkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan dasar sebagai

akibat dari penurunan dua komoditas tersebut. Kondisi ini mengancam bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang.

4. Adanya krisis ekonomi global pada awal tahun 2009 menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh pihak swasta. Dengan motif mengurangi biaya produksi dan mewujudkan efisiensi, pihak perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada dituntut melakukan rasionalisasi dalam segala aspek termasuk rasionalisasi tenaga kerja.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Sintang

Secara geografis, Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat atau di antara $1^{\circ}05'$ Lintang Utara serta $0^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur serta $113^{\circ}20'$ Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Katulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kapuas Hulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Ketapang, Sanggau dan Sekadau

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2008 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa (sebanyak 98

Desa Pemekaran pada bulan Desember 2007), 6 kelurahan dan 638 dusun, di mana 84 Desa/Kelurahan adalah desa swasembada dan 92 Desa/Kelurahan swakarya.

Pemerintah Kabupaten Sintang yang ibukotanya terletak di Kota Sintang didirikan pada tahun 1957 dan hingga tahun 2008 telah pernah dipimpin oleh 15 Bupati atau Kepala Daerah yang memimpin roda pemerintahan daerah. Saat ini struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Terdiri Dari 3 Asisten (Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Dan Asisten Administrasi Umum) Serta 11 Bagian (Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Ekonomi Dan Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Informasi Dan Komunikasi, Bagian Pemuda Dan Olah Raga, Bagian Pertanahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Penanaman Modal Serta Bagian Santel Dan PDE)
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang
3. Inspektorat Kabupaten Sintang

4. Dinas (13 Dinas) yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen Sintang (Kelas C)
6. Satuan: Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kecamatan (14 Kecamatan)
8. Kelurahan (6 Kelurahan)
9. Staf Ahli

Dari aspek luas wilayah, Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ke tiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten

Ketapang dan Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Penduduk Kabupaten Sintang dilihat dari jenis pekerjaan utama atau mata pencaharian, sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian yaitu sebesar 78,23 %. Untuk lebih jelasnya rincian penduduk menurut mata pencaharian pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Penduduk Kabupaten Sintang Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Dan Jenis Kelamin Tahun 2008

NO.	Mata Pencaharian	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah (L + P)
1	2	3	4	5
1	Pertanian	73,70	86,32	78,23
2	Pertambangan	5,83	-	3,74
3	Industri	2,05	0,67	1,55
4	Konstruksi	2,07	-	1,32
5	Perdagangan	6,29	7,56	6,76
6	Angkutan	2,40	0,66	1,78
7	Lembaga Keuangan	0,26	0,43	0,32
8	Pemerintahan/Jasa	6,56	4,13	5,68
9	Lain-lain	0,84	0,23	0,62
	Jumlah	100	100	100

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Berdasarkan tabel tersebut di atas memperlihatkan, bahwa lapangan usaha utama penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2008 masih pada sektor pertanian sebesar 78,3 %, kemudian sektor perdagangan sebesar 6,76 % selanjutnya sector pemerintahan/jasa sebesar 5,68 %. Dilihat dari kelompok umur, penduduk usia kerja (umur 15 – 64 tahun) di Kabupaten Sintang tahun 2008 sebanyak 62,81 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sintang.

Luas tanam padi sawah di Kabupaten Sintang tahun 2008 mencapai 24.165 Ha, padi ladang 26.927 Ha, Jagung 4.133 Ha dan kedelai 121 Ha. Sedangkan produksi tanaman padi sawah dan padi ladang sebanyak 47.93 ton, jagung 5.968 ton dan kedelai 131 ton.

Tabel 4.2. Luas Panen Dan Produksi Tanaman Pangan Dan Palawija Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Tanaman Pangan dan Palawija	Luas Panen	Produksi
1	2	3	4
1	Padi sawah	24.165 Ha	27 ton
2	Padi ladang	26.927 Ha	20,93 ton
3	Jagung	4.133 Ha	5.968 ton
4	Kedelai	121 Ha	131 ton

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Produksi padi (sawah maupun ladang) di Kabupaten Sintang sebesar 47,93 ton per tahun belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan jumlah penduduk 335.418 jiwa, maka kebutuhan beras di Kabupaten Sintang sebesar 30.187,62 ton per tahun. Jumlah tersebut tentunya masih minim sekali jika dibandingkan produksi setiap tahunnya.

Produksi ternak di Kabupaten Sintang selama tahun 2008 terdiri dari Sapi sebanyak 23.540 ekor, Kerbau sebanyak 2.601 ekor, Kambing sebanyak 69.622 ekor, babi sebanyak 21.801 ekor, ayam Buras 528.965 ekor, Ayam Ras 860.500 ekor dan itik sebanyak 42.565 ekor.

Tabel 4.3. Populasi Ternak Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Ternak	Jumlah
1	2	3
1	Sapi	23.540 ekor
2	Kerbau	2.601 ekor
3	Kambing	69.622 ekor
4	Babi	21.801 ekor
5	Ayam Buras	528.965 ekor
6	Ayam Ras	860.500 ekor
7	Itik	42.565 ekor

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Potensi perikanan meliputi perairan umum seluas 200.000 Ha dapat menghasilkan ikan air tawar sebanyak 10.000 ton setiap tahunnya (potensi lestari sebesar 50 Kg /Ha /Th). Pada tahun 2003 produksi perikanan di Kabupaten Sintang sebesar 3.475 ton terdiri dari yang berasal dari perairan umum sebesar 2.264,2 ton, Budidaya sebanyak 1.211,6 ton.

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup pesat hal ini terlihat dari peningkatan luas areal dan

produksi hasil perkebunan. Dilihat dari pengelolaannya, sektor perkebunan di Kabupaten Sintang terdiri dari: perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan. Komoditas utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan seperti: lada, kopi dan kakao. Untuk pengembangan areal perkebunan, lahan yang dapat dimanfaatkan adalah areal hutan produksi yang dapat dikonversi dan pertanian lahan kering.

Tabel 4.4. Luas Panen Dan Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Tanaman Perkebunan	Luas Panen	Produksi
1	2	3	4
1	Karet	88.120 Ha	41.653 ton
2	Kelapa dalam	1.447 Ha	565 ton
3	Kelapa hibrida	948 Ha	295 ton
4	Kelapa sawit	44.607 Ha	68.986 ton
5	Lada	1.008 Ha	526,00 ton
6	Kopi	517 Ha	181 ton
7	Kakao	2.382 Ha	29 ton
8	Aneka tanaman	2.766 Ha	51 ton

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Perkembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Sintang hingga tahun 2008 adalah sebagai berikut ; Tanaman Karet seluas 88.120 Ha, dengan produksi sebanyak 41.653 ton. Kelapa dalam seluas 1.447 Ha dengan produksi sebanyak 565 ton. Kelapa Hibrida seluas 948 Ha, dengan produksi sebanyak 295 ton, kelapa sawit seluas 44.607 Ha, dengan produksi 68.986 ton. Tanaman Lada seluas 1.008 Ha dengan produksi sebanyak 526,00 ton. Tanaman Kopi seluas 517 Ha, dengan

produksi sebanyak 181 ton dan Tanaman Kakao seluas 2.382 Ha, dengan produksi sebanyak 29 ton serta aneka tanaman seluas 2.766 Ha dengan produksi 51 ton.

Salah satu indikator untuk kemajuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan. Tinggi rendahnya tingkat perekonomian suatu daerah ditentukan oleh tinggi rendahnya PDRB daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah menunjukkan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 7.909.640,- yaitu berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp. 7.909.640,- atau sebesar Rp. 659.137,- per bulan. Jika dibandingkan PDRB nasional yaitu Rp. 708.544 per bulan, maka PDRB per kapita Kabupaten Sintang masih lebih kecil.

Sedangkan perkembangan PDRB menurut sektor/lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 4.5. Perkembangan PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Lima Tahun Terakhir

No.	Sektor/Lapangan Usaha	Atas dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1	Pertanian	647.922,48	213.559,06
2	Pertambangan dan penggalian	75.022,39	24.563,43
3	Industri Pengolahan	93.683,15	44.237,26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.568,03	2.403,59
5	Bangunan	52.429,25	23.880,15
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	330.066,48.	158.946,72
7	Pengangkutan dan Komunikasi	32.197,26	16.403,30
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Pers.	56.228,17	34.805,11
9	Jasa-jasa	99.573,46	50.464,43
	Jumlah	1.392.690,67	569.63,05

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan/dilihat dari besarnya sumbangan atau kontribusi dari salah satu sektor yang paling dominan dalam pendapatan regional (PDRB) tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat dan disertai dengan harga yang

meningkat tajam akan menggeser peranan sektor yang mengalami pertumbuhan dan harga yang meningkat dengan lambat dalam perekonomian.

Untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6. Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Lima Tahun Terakhir

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	47,57	48,45	46,13	45,83	45,88
2	Pertambangan dan penggalian	5,23	5,33	5,37	5,44	5,50
3	Industri Pengolahan	4,15	5,41	5,97	6,30	6,72
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,31	0,29	0,31	0,36	0,39
5	Bangunan	4,28	4,06	3,92	3,85	3,87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,40	24,70	24,50	24,40	23,93
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,51	2,47	2,42	2,33	2,27
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Pers.	4,33	4,17	4,08	4,16	4,15
9	Jasa-jasa	7,22	7,11	7,29	7,38	7,30
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2008.

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu daerah. Daerah dikatakan memiliki ekonomi yang stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan dengan inflasi daerah lain dalam suatu periode tertentu. Laju Inflasi menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen yang ditunjukkan oleh indeks harga implisit PDRB. Laju Inflasi atas dasar harga

produsen di Kabupaten Sintang tahun 2008 sebesar 5,97 %. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi propinsi Kalimantan Barat, sebesar 4,03%.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008

1. Tata Cara Pengorganisasian

Menurut Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin dilakukan secara lintas sektoral antar unit kerja seperti Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008, Perum Bulog Wilayah III Sintang, Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang, Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, Camat, dan Lurah/Kepala Desa serta Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sintang.

Karena melibatkan berbagai unit kerja, diperlukan pengorganisasian secara terpadu antara unit-unit kerja. Salah satu aspek penting dalam pengorganisasian tersebut adalah adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja terkait. Pembagian Tugas Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pemantauan Raskin di Kabupaten Sintang yang secara Fungsional didukung oleh Tim

Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Penanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran, adalah Perum Bulog Wilayah III Sintang sesuai Tingkat Wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin. Penanggungjawab Penyediaan Data Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin adalah Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang.

Penanggungjawab menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang adalah Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang dengan Keputusan Bupati Sintang. Penanggungjawab Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM), maupun Penyelesaian Administrasi Pembayaran, adalah Camat, Lurah/Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi dan dipantau oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008, dan Kecamatan.

Penetapan Penerima Manfaat Program Beras Raskin sebagai Hasil Musyawarah Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat

setempat, selaku Penanggungjawab Program Beras Raskin di Kelurahan/Desa. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang adalah Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dibentuk oleh Bupati Sintang.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja terkait dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Pelaksana	Tugas	Pelaksanaan Tugas
1.	Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008	Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pemantauan Raskin di Kabupaten Sintang	Tugas dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat penetapan Keputusan Penerima Manfaat, pendistribusian dan evaluasi pelaksanaan. Rapat dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi, aspek yang dibahas adalah kesiapan pelaksanaan serta kendala yang dihadapi. Kunjungan lapangan oleh Tim jarang dilakukan

sambungan Tabel 4.7.

No	Pelaksana	Tugas	Pelaksanaan Tugas
2.	Perum Bulog Wilayah III Sintang	Penanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayarannya	Tugas dilaksanakan hanya dengan mengeluarkan beras dari gudang Dolog. Kunjungan lapangan jarang dilakukan
3.	Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang	Penanggungjawab Penyediaan Data Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin	Penyediaan data umumnya bersumber dari data sekunder
4.	Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang	Penanggungjawab menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang	menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang dengan SK Bupati
5.	Camat, Lurah/Kepala Desa	Penanggungjawab Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM), maupun Penyelesaian Administrasi Pembayarannya	Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM), maupun Penyelesaian Administrasi Pembayarannya melibatkan pihak ketiga

sambungan Tabel 4.7.

No	Pelaksana	Tugas	Pelaksanaan Tugas
6.	Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang	Kurang di kenal masyarakat, sehingga pengaduan lebih banyak ke kepolisian dan kejaksaan

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 belum berjalan secara optimal. Indikasi hal tersebut adalah, untuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008, Tugas dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi saja. Frekwensi rapat sangat minim, yaitu dalam 1 tahun hanya 3 kali saja, yaitu pada saat penetapan Keputusan Penerima Manfaat, pendistribusian dan evaluasi pelaksanaan.

Kunjungan lapangan oleh Tim Koordinasi untuk melihat proses distribusi dan pemantauan ke penerima manfaat tidak pernah dilakukan. Kunjungan lapangan adalah kegiatan Tim Koordinasi untuk melakukan pemantauan secara langsung pada Kecamatan – Kecamatan dan Desa – Desa pada saat penyaluran Raskin yang sangat jarang dilakukan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap proses evaluasi pelaksanaan program, karena dengan adanya kunjungan lapangan

akan diketahui secara detail permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program

Pelaksanaan tugas Perum Bulog Wilayah III Sintang, hanya dengan mengeluarkan beras dari gudang Dolog saja. Padahal Perum Bulog Wilayah III Sintang bertanggungjawab terhadap kuantitas dan kualitas beras yang diberikan serta proses penyaluran sampai titik distribusi. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang petugas dari Perum Bulog Wilayah III Sintang hal ini disebabkan tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan pemantauan apakah kuantitas dan kualitas beras dapat diterima secara baik oleh penerima manfaat.

Pelaksanaan tugas Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang, berupa penyediaan data umumnya bersumber dari data sekunder. Artinya data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan bersumber dari data lama yang sudah tersedia tanpa adanya pemutakhiran data. Bahkan data Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2008, masih menggunakan data tahun 2005. Padahal data jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami perubahan.

Pelaksanaan tugas Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, yaitu hanya menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang dengan SK Bupati. Padahal Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang juga bertanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan program secara keseluruhan.

Pelaksanaan tugas Camat, Lurah/Kepala Desa, hanya mendistribusikan Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM). Penyelesaian Administrasi Pembayaran Beras Raskin kepada Perum Bulog Wilayah III Sintang melibatkan pihak ketiga. Hal ini disebabkan baik Camat maupun Lurah/Kepala Desa tidak memiliki dana untuk menebus beras dimaksud sehingga meminjam atau meminta bantuan uang kepada pihak ketiga, dengan perjanjian apabila beras sudah diambil oleh penerima manfaat raskin, uang tersebut baru diganti. Pelaksanaan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), Kurang di kenal masyarakat, karena minimnya sosialisasi sehingga pengaduan lebih banyak ke kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, guna mempercepat Proses Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Kabupaten Sintang agar dapat tercapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka telah di bentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 953 TAHUN 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Tim sebagaimana dimaksud bertugas Mengkoordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Evaluasi dan Distribusi Program Beras

Untuk Keluarga Miskin yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan Kondisi Objektif Daerah Kabupaten Sintang.

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1.	Bupati Sintang	Penanggungjawab	Memberikan arahan-arahan dan kebijakan-kebijakan dalam Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
2.	Wakil Bupati Sintang	Wakil Penanggungjawab	Membantu tugas dalam Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ketua	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Tim
4.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinir kegiatan Tim.

sambungan Tabel 4.8.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
5.	Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang	Koordinator Pelaksana	Mengkoordinir Penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang	Wakil Koordinator	Mengkoordinir Penyediaan Data Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin
7.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris	Mengkoordinir penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang
8.	Kepala Seksi Komersil Perum Bulog Wilayah III Sintang	Wakil Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas sekretaris dalam menetapkan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang

sambungan Tabel 4.8.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
9.	Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Penelahaan aspek hukum Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 seperti koreksi Surat Keputusan (SK) Bupati dan sebagainya
11.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Membantu perencanaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
12.	Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang	Anggota	Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang
13.	Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
14.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

sambungan Tabel 4.8.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
15.	Teti Suharni, SP, MM Staf Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
16.	Halimatusa'diah Staf Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, 2009.

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 sebagian sudah terlaksana sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2008. Namun demikian, karena kesibukan dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya, Bupati Sintang sebagai Penanggungjawab, Wakil Bupati Sintang sebagai Wakil Penanggungjawab, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Ketua serta Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Wakil Ketua, maka untuk aspek yang bersifat teknis pelaksanaan tugas tersebut diimpahkan kepada jajaran anggota Tim dibawahnya yang dikoordinir oleh Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang dan Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Penanggungjawab Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah Bupati Sintang yang secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Sedangkan Penanggungjawab Tingkat Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa. Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai Program Raskin kepada RTM Penerima Manfaat, Masyarakat Umum dan Pelaksana Program secara berjenjang sesuai Tingkatan Wilayahnya.

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Sintang yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada Bupati Sintang yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN oleh Kecamatan serta melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di Wilayah Kabupaten Sintang. Bertugas sebagai koordinator perencanaan Program RAKIN di Kabupaten Sintang; Fasilitas Lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebaran informasi Program RASKIN; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi RASKIN Kabupaten Sintang dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan se Kabupaten Sintang. Tim koordinasi RASKIN Kabupaten Sintang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda,

Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Sub Divre Sintang dan Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Sintang. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan berfungsi merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kecamatan; Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa/Kelurahan. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri Penanggung Jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinasi Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN dan pihak terkait yang dipandang perlu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan belum dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diungkapkan di atas secara optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi adalah, belum tersusunnya perencanaan Program RASKIN di Kecamatan;

Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan belum terlaksana; serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa/Kelurahan belum berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Tugas Tim agar lancar, maka dibentuk Tim Sekretariat yang mempunyai Tugas membantu Pelaksanaan Tugas Tim dalam Bidang Kesekretariatan dan hal-hal yang berkaitan dengan Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) bertanggungjawab kepada Bupati Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Tim Sekretariat RASKIN Kabupaten Sintang, tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten Sintang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Saat ini yang baru dapat dilakukan hanya terbatas pada penyusunan Panduan Pelaksanaan Raskin saja. Fasilitas Lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kabupaten Sintang; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi di Tingkat

Desa/Kelurahan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan pelaksana Distribusi di Tingkat Desa/Kelurahan dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan belum efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan kesibukan anggota Tim sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bersama-sama Unsur Pengawasan/Inspektorat lainnya serta Pengawasan dari Perusahaan Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Barat. *Leading* sektor Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) diketahui pengaduan terhadap penyimpangan Raskin tidak pernah diterima mereka. Umumnya pengaduan dilakukan langsung ke pihak kepolisian ataupun Inspektorat Kabupaten Sintang. Pengaduan yang telah ditindak lanjuti melalui pemeriksaan pihak kepolisian ataupun Inspektorat Kabupaten Sintang antara lain adalah terhadap Kepala Desa Merako Jaya (Kecamatan Serawai), Kepala Desa Buntut Sabon (Kecamatan Ambalau), Kepala Desa Air Nyuruk (Kecamatan Ketungau Hilir) dan terhadap Camat Dedai (sebagai saksi).

Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Oleh karena itu, tahap

awal langkah-langkah pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai kebijakan pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Bulan	Peserta Yang Diundang	Jumlah Peserta Yang Hadir	Keterangan
1	Sintang	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 119 orang	* Tidak semua peserta dari Desa hadir
2	Sepauk	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 84 orang	* Sosialisasi diwarnai interupsi peserta mengenai data yang tidak cocok
3	Tempunak	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 52 orang	* Adanya keluhan terhadap pelaksanaan Raskin Tahun sebelumnya
4	Sungai Tebelian	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 47 orang	
5	Dadai	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 79 orang	
6	Kelam Permai	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 66 orang	
7	Kayan Hilir	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 71 orang	
8	Kayan Hulu	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 39 orang	
9	Serawai	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 72 orang	
10	Ambalau	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 26 orang	
11	Banjai Hulu	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 46 orang	
12	Ketungau Hilir	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 51 orang	
13	Ketungau Tengah	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 87 orang	
14	Ketungau Hulu	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 63 orang	

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan sosialisasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 tidak semua peserta dari Desa hadir. Sosialisasi diwarnai interupsi peserta mengenai data yang tidak cocok, serta Adanya keluhan terhadap pelaksanaan Raskin Tahun sebelumnya. Sosialisasi Program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program RASKIN kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, Masyarakat umum dan pelaksanaan Program di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelola, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan serta hak hak dan kewajiban masing masing. Sosialisasi Program RASKIN dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain Rapat Koordinasi yang diselenggarakan diseluruh tingkat mulai dari Kabupaten sampai Desa/ Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan sehingga Program RASKIN berjalan dengan baik. Sosialisasi ditingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Desa yang telah ada. Sosialisasi juga dapat dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan /atau Forum pertemuan tingkat Desa/Kelurahan lainnya.

Selanjutnya, Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi yaitu antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

Melalui Media lainnya, antara lain melalui buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain lain.

Guna mendukung pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008, anggaran kegiatan raskin sebesar Rp. 200.000.000 pada Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, diperuntukan untuk sosialisasi raskin sampai tingkat kecamatan, mendampingi, melaporkan dan mengawasi (memonitor) perum bulog pada saat pelaksanaan pendistribusian raskin sampai ke penerima manfaat (14 Kec) di Kabupaten Sintang. Rincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 39.195.000,00 diperuntukkan untuk : Honorarium Tim raskin Kabupaten yang melibatkan berbagai instansi terkait (16 Orang). Honorarium Tim sekretariat yang terdiri dari Camat pada 14 Kecamatan sekabupaten Sintang yang mengkoordinir keg.Raskin pada wilayah masing-masing dan kasi ekbang pada 14 Kecamatan sekabupaten Sintang (14 Kec X 2 Org = 28 Org). Tim Sekretariat yang pesertanya adalah Staf Bagian Ekbang (19 Org) yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tim dalam bidang kesekretariatan dan hal-hal yang berkaitan dengan program beras untuk keluarga miskin.
2. Belanja ATK sebesar Rp. 3.492.000,00. Diperuntukkan untuk : a.Belanja ATK untuk peserta sosialisasi raskin yang dilaksanakan di Kabupaten. Belanja

- ATK selama Kegiatan (Dari Bln Januari s/d Desember).Ex.Surat-menyurat, pelaporan dan sebagainya.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.050.000,00. Diperuntukkan untuk: Cetak buku pedoman raskin untuk peserta sosialisasi yang dilaksanakan dikabupaten Sintang. Foto copy Juklak dan juknis untuk peserta sosialisasi yang dilaksanakan dikabupaten Sintang sampai ketinggian Kecamatan, Foto copy bahan rapat dan bahan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan raskin (Dari Bln Januari s/d Desember).
 4. Belanja makan dan minum Kegiatan sebesar Rp.16.218.000,00. Diperuntukkan untuk : a. Makan dan minum Kegiatan tim sekretariat (Dari Bln Januari s/d Desember). Makan dan minum rapat Tim raskin kabupaten (untuk 17 Org) Dari Bln Januari s/d Desember.
 5. Belanja Perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 64.600.000,00. Diperuntukkan untuk : Perjalanan dinas ke provinsi dalam rangka koordinasi dan penyampaian laporan pelaksanaan raskin di kabupaten sintang yang dilaporkan pada setiap bulannya ke kantor gubernur dan perum bulog Provinsi Kalbar. (Dari Bln Januari s/d Desember). Perjalanan dinas keprovinsi (Kantor Gubernur)dalam rangka sosialisasi dan evaluasi raskin (6 Bulan Sekali) Dari Bln Januari s/d Desember . Perjalanan dinas ke Jakarta (Dirjen PMD) dalam rangka sinkronisasi data raskin,mengingat data masyarakat miskin sebagai penerima manfaat raskin mengacu pada data BPS pusatdan

selalu tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, maka koordinasi dalam rangka sinkronisasi data perlu dilakukan.

2. Tata Cara Distribusi

Menurut Kepala PERUM BULOG Wilayah III Sintang, untuk efektif dan efisiensinya Pendistribusian Raskin, bagi Kecamatan/Kelurahan/Desa tertentu dengan Pertimbangan Geografis, Jarak Tempuh dan Medan yang dilalui, Penyediaan Beras Raskin dapat dilakukan sekaligus selama 3 (tiga) bulan ke depan yang Teknis Operasionalnya diatur dan dikoordinasikan antara masing-masing para Camat se-Kabupaten Sintang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah III Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat penetapan titik distribusi telah disepakati yaitu pada Desa/Kelurahan yang menjadi ibukota masing-masing Kecamatan.

Titik Distribusi adalah Tempat atau Lokasi Penyerahan Beras oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Desa yang dapat ditinjau oleh Penerima Manfaat Program Beras Raskin, atau Lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara Tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Wilayah III Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, untuk mendukung Pelaksanaan Program Raskin tersebut, kepada para Camat se-Kabupaten Sintang agar menindaklanjuti Penetapan Titik-titik Distribusi dan

menyebarkan Kebijakan ini (Sosialisasi) kepada seluruh Lurah/Kepala Desa dan kepada Penerima Manfaat (Rumah Tangga Miskin) sebagai Acuan/Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008 di Wilayah masing-masing. Selain itu, Camat juga diminta untuk meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Raskin dimaksud di Lapangan secara Hirarki (berjenjang) sampai dengan Tingkat Kelurahan/Desa, termasuk Pengawasan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.600/Kg Netto di Titik Distribusi.

Titik distribusi Raskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Titik Distribusi Raskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Titik Distribusi	Keterangan
1	Sintang	Kelurahan Tanjungpuri	Pada kondisi tertentu (kemarau) beberapa titik distribusi mengalami pergeseran karena angkutan tidak dapat mencapai lokasi dimaksud. Konsekuensinya adalah biaya atau ongkos angkut bertambah, dan hal tersebut dibebankan pada kenaikan harga Raskin.
2	Sepauk	Desa Tanjung Ria	
3	Tempunak	Desa Nanga Tempunak	
4	Sungai Tebelian	Desa Sungai Uko	
5	Dedai	Desa Nanga Dedai	
6	Kelam Permai	Desa Kebong	
7	Kayan Hilir	Desa Nanga Mau	
8	Kayan Hulu	Desa Nanga Tebidah	
9	Serawai	Desa Nanga Serawai	
10	Ambalau	Desa Nanga Kemangai	
11	Binjai Hulu	Desa Binjai Hulu	
12	Ketungau Hilir	Desa Nanga Ketungau	
13	Ketungau Tengah	Desa Wirayuda	
14	Ketungau Hulu	Desa Senaning	

Sumber: Data Primer diolah, 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, pada kondisi tertentu (kemarau) terutama melalui angkutan sungai beberapa titik distribusi mengalami pergeseran karena angkutan tidak dapat mencapai lokasi dimaksud. Konsekuensinya adalah biaya atau ongkos angkut bertambah, dan hal tersebut dibebankan pada kenaikan harga Raskin. Demikian juga melalui angkutan darat, apabila musim hujan jalan tidak bisa dilalui oleh mobil sehingga titik distribusi juga mengalami pergeseran tempat.

Menurut Kepala PERUM BULOG Wilayah III Sintang, pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang ditunjuk oleh Camat, Lurah/Desa, dibantu oleh Anggota Masyarakat, atau Institusi Ekonomi Masyarakat lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan Beras kepada Penerima Manfaat Program Beras Raskin. Selanjutnya, menurut Kepala PERUM BULOG Wilayah III Sintang, dalam upaya kelancaran Pelaksanaan Pendistribusian Beras Raskin dimaksud, di Kabupaten Sintang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Bupati Sintang dan Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah III Sintang Nomor 2 Tahun 2005 dan Nomor SK.14/III/14000/03/2005 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang;
2. Keputusan Bupati Sintang Nomor 953 TAHUN 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan,

Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008.

3. Keputusan Bupati Sintang Nomor 954 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Yang Menerima Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008.
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1051 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Perihal Penunjukan Personil Tim Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008.
5. Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

Ongkos Angkut dan lain-lain dari Titik Distribusi ke Rumah Penerima Manfaat diberi Hak untuk membuat kesepakatan berdasarkan Hasil Musyawarah para Penerima Manfaat, untuk menetapkan harga jual diatas, Rp. 1.600,00/Kg serta jumlah Beras yang diterima/dibeli kurang dari 7,39 Kg/RTM per bulan, dengan maksud untuk penyesuaian jumlah data Kongkrit Rumah Tangga Miskin (RTM) di Lapangan yang klasifikasinya mempunyai Hak sebagai Penetima Manfaat agar dibuat dalam Berita Acara secara Transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima Manfaat, mereka merasa keberatan atas

kesepakatan-kesepakatan dimaksud, karena jumlah Beras yang diterima/dibeli tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Kepala Bulog Sintang, apabila terjadi Pengaduan, Keluhan ataupun Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pendistribusian Beras Raskin, baik yang disampaikan secara Lisan, Tertulis/Surat ataupun melalui Media Massa (Cetak dan Elektronik), agar segera diambil langkah dan tindakan Penyelesaian atau Klarifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) secara terkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2003.

Menurut Kepala PERUM BULOG Wilayah III Sintang, mekanisme Distribusi dilakukan yaitu Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang berdasarkan Alokasi Jumlah RTM dan Kuantum Beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Sintang. Untuk Kelengkapan dan Tertib Administrasi Camat juga mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang berdasarkan Alokasi Jumlah RTM dan Kuantum Beras untuk masing-masing Kelurahan/Desa di Wilayahnya.

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA), tersebut selanjutnya Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) Beras atas Nama Kecamatan/Kelurahan/Desa

dimaksud kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin Perum Bulog Wilayah III Sintang. Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bulan/Periode tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu, dapat dilayani dengan SPA tersebut kecuali apabila ada Perubahan Lokasi dilakukan dengan menerbitkan SPA baru yang merujuk pada SPA lama yang belum terlayani. SPA untuk Pelayanan tersebut harus dipisahkan dengan SPA Rutin bulan berjalan.

Berdasarkan SPBB/DO, Satuan Kerja (Satker) Raskin mengambil Beras di GBB Perum Bulog Wilayah III Sintang, untuk mengangkut dan menyerahkan Beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi yang disepakati. Kualitas Beras yang diserahkan harus sesuai dengan Standar Kualitas Perum Bulog yang telah ditentukan. Apabila tidak memenuhi Standar Kualitas maka Beras dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti. Serah terima Beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang merupakan Pengalihan tanggung jawab. Camat/Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas diterimanya Beras sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat. Camat/Lurah/Kepala Desa wajib mengawasi Proses Pelaksanaan Pendistribusian Kepala Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi.

Penyerahan Beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi

yang menerima Beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan Identitas Penandatanganan dicantumkan secara jelas dan di Cap/Stempel Desa/Kelurahan/Kecamatan. Berdasarkan BAST, Wilayah III Sintang membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan yang ditanda tagani Satker Raskin Wilayah III Sintang dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk.

Berdasarkan hal tersebut, Perum Bulog Wilayah III Sintang membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin per Kabupaten yang ditanda tangani oleh Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang dan Bupati Sintang atau Pejabat yang mewakili dan Seorang Saksi dan Anggota Tim Raskin Kabupaten Sintang. Nama dan Identitas Penandatanganan harus jelas dan disertai Cap/Stempel. Pembuatan MBA-1 selesai ditanda tangani dikirim ke Divisi Regional Wilayah III Sintang dengan Lampiran Copy SPA dan Rekap DO (MDO).

Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTM Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER Raskin pada prinsipnya dilakukan secara Tunai dengan harga Rp. 1.600,00/Kg di Titik Distribusi. Pelaksanaan Distribusi membuat Daftar Pendistribusian Beras kepada RTM Penerima Manfaat Raskin dan

Pembayarannya yang ditanda tangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pertanggungjawaban.

Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTM Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Apabila Uang HPB Raskin disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Perum Bulog Wilayah III Sintang maka Bukti Setor Asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Sebelumnya dikonfirmasi Bukti Setor tersebut kepada Bank yang bersangkutan.

3. Indikator Keberhasilan

Menurut Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, salah satu Indikator Keberhasilan Program Raskin adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat. Artinya, RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain). Tepat Jumlah; Jumlah Beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah maksimal sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan hasil Musyawarah Kelurahan/Desa. Tepat Harga; Harga Beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi yang telah disepakati. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)

Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Tabel 4.11. Indikator Keberhasilan Program Raskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Indikator Keberhasilan	Uraian	Realisasi Lapangan
1	Tepat Sasaran Penerima Manfaat	RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat	Mengacu pada Data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu 33.603 rumah tangga miskin. Raskin banyak diterima oleh Rumah Tangga yang tidak berhak
2	Tepat Jumlah	Jumlah Beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah maksimal sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 12 (dua belas) bulan	Masih ada rumah tangga yang menerima Raskin kurang dari 10 Kg/RTM/bulan selama 12 (dua belas) bulan
3	Tepat Harga	Harga Beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi	Harga Beras RASKIN di atas Rp. 1.600,-/Kg di Titik Distribusi yaitu Rp 2.000 ke atas.
4	Tepat Waktu	Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi	Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) belum sesuai dengan Rencana Distribusi (selalu terlambat)
5	Tepat Administrasi	Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu	Persyaratan administrasi tidak tertib dan kurang lengkap

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Dari hasil wawancara dengan Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga

Miskin Tahun 2008, diketahui bahwa hampir seluruh indikator keberhasilan program raskin tersebut tidak dapat terlaksana. Dari indikator tepat sasaran, masih ditemui penerima manfaat bukan dikategorikan rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penerima manfaat, di Desa tempatnya banyak warga yang seharusnya menerima tidak mendapat Raskin, namun banyak pula warga yang seharusnya tidak dapat karena menurutnya masih terhitung mampu (kaya) tapi menerima Raskin. Menurut penerima manfaat tersebut, rata-rata warga di Desa mereka yang seharusnya tidak layak menerima Raskin rata-rata 5 – 10 Kepala Keluarga. Kalau ini dikalkulasikan seluruh Kabupaten Sintang (281 desa), maka jumlah tersebut mencapai 1.000 sampai dengan 2.000 Kepala Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, indikator tepat jumlah, masih ada rumah tangga yang menerima Raskin kurang dari 10 Kg/RTM/bulan selama 12 (dua belas) bulan, karena adanya kesepakatan untuk membagi pada masyarakat yang lain. Bahkan ada alasan yang dikemukakan Kepala Desa bahwa jatah yang diterima kurang sehingga tidak dapat membaginya sebanyak 10 kg. Indikator tepat harga, juga belum terlaksana, karena harga yang sampai ke titik distribusi yang telah disepakati melebihi Rp. 1.600,00/Kg. Indikator tepat waktu, dimana waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) belum sesuai dengan Rencana Distribusi (selalu terlambat). Faktor penyebab antara lain, karena dana pengambilan Raskin ke

Perum Buloh harus tunai, sehingga rata-rata setiap Kecamatan melakukan kerjasama dengan penyandang dana (pihak ketiga). Indikator tepat administrasi, Persyaratan administrasi tidak tertib dan kurang lengkap, karena perbedaan jumlah data penerima manfaat dan tidak adanya rekomendasi Camat.

4. Pemantauan

Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang menyatakan pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan Pemantauan dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan dan dapat dilakukan oleh Pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Waktu Pemantauan dilakukan secara Periodik sesuai dengan kebutuhan. Hasil Pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Kabupaten atau Tim Raskin Kecamatan secara berkala untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, kinerja Tim Koordinasi Kabupaten dalam melakukan pemantauan masih sangat lemah. Indikasi hasil tersebut adalah pelaksanaan pemantauan ataupun monitoring terhadap pelaksanaan Raskin sangat jarang dilakukan. Menurutnya, pemantauan hanya dilakukan atas dasar laporan-laporan yang disampaikan Camat saja, namun tidak melakukan uji petik ke lapangan.

Kondisi tersebut tentunya cukup memprihatinkan, karena Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan Evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan

Tim Raskin Kecamatan dan dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Institusi/Lembaga lain sesuai kebutuhan. Waktu Evaluasi dapat dilakukan secara Periodik atau sesuai kebutuhan. Hasil Evaluasi Program Raskin dipaparkan kepada Institusi atau Pihak terkait dan dilaporkan kepada Penanggungjawab Program Raskin sesuai dengan Tingkatan Wilayahnya. Menurut Camat dan Kepala Desa, hasil Evaluasi Program Raskin belum pernah dipaparkan kepada pihak Kecamatan maupun pihak Pemerintah Desa.

Pengaduan Masyarakat berupa Keluhan, Kritik dan Saran Perbaikan terhadap Pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara Fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan sesuai Tingkatan Wilayahnya. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Sintang secara Fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemanatau di Kabupaten Sintang, sedangkan Perum Bulog Wilayah III Sintang berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya Pengaduan/Keluhan Masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung Pengaduan, melakukan Pengecekan, Penelitian, Konfirmasi sampai menindaklanjuti untuk Pengaduan/Keluhan yang terkait dengan Internal Perum Bulog Wilayah III Sintang. Penanganan terhadap Pengaduan yang timbul di Masyarakat akibat terjadinya ketidak serasian dalam Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang secara Tenis dapat diselesaikan oleh Tim Raskin disetiap Tingkatan melalui Unit Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Masyarakat tentang

Pelaksanaan Program Raskin dapat berasal dari Penerima Raskin atau Masyarakat Umum secara langsung atau melalui Media Massa Cetak dan Elektronik (Surat Kabar, Televisi, dan Radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Faxsimile, E-mail, Telepon, Laporan dari Kemasyarakatan, dan Pertemuan dengan Lembaga Independet, Perguruan Tinggi/Institusi Kemasyarakatan yang terkait lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Camat, Kepala Desa dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin Tahun 2008, diketahui bahwa pengaduan Masyarakat berupa Keluhan, Kritik dan Saran Perbaikan terhadap Pelaksanaan Program Raskin tidak pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti. Artinya unit kerja terkait yang terlibat dalam pelaksanaan raskin belum berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya Pengaduan/Keluhan Masyarakat tersebut.

C. Penentuan Jumlah Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008

1. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1051 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Perihal Penunjukan Personil Tim Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam upaya membantu Rumah Tangga Miskin

(RTM) untuk memenuhi kebutuhan pokok Pangannya. Pemerintah Pusat masih melanjutkan Program Raskin untuk Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk meningkatkan/membuka akses Pangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan.

Setiap Rumah Tangga Miskin telah ditetapkan sebagai penerima manfaat diperkenankan membeli Beras RASKIN Maksimal 10 Kg/bulan selama 12 (dua belas) bulan (mulai bulan Januari 2008 s/d Desember 2008) dengan harga Rp. 1.600,00/Kg di Titik Distribusi secara tunai, dan apabila ada penerima manfaat yang tidak mampu, dapat membeli sesuai dengan keuangan yang dimiliki oleh penerima manfaat yang bersangkutan.

Menurut Kepala Bagian Ekbang, guna meningkatkan efektifitasnya pelaksanaan Program RASKIN disusun Rencana Distribusi selama periode 2008 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal sesuai kondisi obyektif masing-masing Kecamatan dan dapat diatur dalam Petunjuk Teknis. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat khususnya pada waktu musim paceklik (di luar musim panen). Beras yang didistribusikan untuk program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras RASKIN". Jika tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras RASKIN" maka dapat menggunakan persediaan beras berlogo "Beras BULOG" yang ada.

Prinsip-Prinsip pengelolaan RASKIN adalah : Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKIN, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggung-jawaban kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Menurut Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, tujuan Program Beras RASKIN adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan Perlindungan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui Pendistribusian Beras dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan. Sasaran Program Beras Raskin Tahun 2008 adalah berkurangnya beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Sintang sebanyak minimal 33.603 RTM melalui Pendistribusian Beras bersubsidi maksimal sebanyak 7,39 Kg/RTM/bulan selama

12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600, 00 (seribu rupiah) per Kilogram Netto di Titik Distribusi.

Jumlah penduduk miskin tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Serawai Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Serawai Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Baras Nabun	506	111
2	Bedaha	346	93
3	Begori	877	245
4	Buntut Ponte	1029	245
5	Karya Jaya	1026	287
6	Merako Jaya	867	200
7	Nanga Jelundung	503	128
8	Nanga Mentatai	718	180
9	Nanga Riyoi	967	201
10	Nanga Segwang	655	163
11	Nanga Serawai	1767	448
12	Pagar Lebata	856	234
13	Tahal Permai	424	100
14	Tanjung Raya	431	123
15	Tontang	469	119
Jumlah		11.441	2.877

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Serawai Tahun 2008 adalah di Desa Nanga Serawai. Sedangkan yang

paling kecil adalah di Desa Bedaha. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ambalau Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ambalau Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Buntut Pimpin	476	134
2	Buntut Sabon	380	103
3	Kepala Jungai	853	240
4	Nanga Ambalau	780	227
5	Nanga Kemangai	587	213
6	Nanga Kesange	906	244
7	Nanga Menakon	533	153
8	Nanga Sake	313	85
9	Tanjung Andan	351	88
	Jumlah	5179	1487

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ambalau Tahun 2008 adalah di Desa Nanga Kesange. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Nanga Sake. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Entogong	362	90
2	Lintang Tambuk	544	145
3	Nanga Abai	424	99
4	Nanga Laar	669	162
5	Nanga Masau	657	148
6	Nanga Payak	533	146
7	Nanga Tebidah	449	109
8	Nanga Tonggoi	403	99
9	Nanga Toran	525	115
10	Nanga Ungai	813	175
11	Riam Muntik	440	109
12	Riam Panjang	456	106
13	Tanjung Bunga	433	160
14	Tanjung Lalau	620	139
	Jumlah	7328	1802

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008 adalah di Desa Nanga Laar. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Entogong. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin

dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sepauk Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sepauk Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Bedayan	433	95
2	Bemayau	594	142
3	Buluh Kuning	195	49
4	Ensabang	536	98
5	Gernis Jaya	165	30
6	Kenyauk	314	72
7	Lengkenat	345	85
8	Mait Hilir	391	99
9	Manis Raya	300	86
10	Nanga Libas	351	115
11	Nanga Pari	707	150
12	Nanga Sepauk	333	86
13	Paoh Benua	179	39
14	Sekubang	814	177
15	Sekujam Timbai	679	156
16	Semuntai	534	134
17	Sinar Pekayau	511	111
18	Sirang Setambang	338	77
19	Tanjung Ria	807	179
20	Tawang Sari	185	48
21	Temawang Muntai	289	74
22	Temiang Kapuas	396	107
	Jumlah	9336	2209

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di

Kecamatan Sepauk Tahun 2008 adalah di Desa Sekubang. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Gemis Jaya. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Tempunak Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Tempunak Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Balai Harapan	598	91
2	Benua Baru	599	152
3	Benua Kencana	355	94
4	Gurung Mali	467	143
5	Kenyabur Baru	311	79
6	Kuala Tiga	369	97
7	Mengkurat Baru	296	66
8	Mensiap Baru	423	115
9	Merti Jaya	516	125
10	Nanga Tempunak	472	123
11	Pagal Baru	387	105
12	Pangkal Baru	557	138
13	Paribang Baru	473	123
14	Pulau Jaya	586	138
15	Repak Sari	336	98
16	Suka Jaya	578	143
17	Tanjung Perada	595	465
18	Tinum Baru	440	146
	Jumlah	8358	2441

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di

Kecamatan Tempunak Tahun 2008 adalah di Desa Benua Baru. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Kenyabur Baru. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Bancoh	419	103
2	Baya Betong	145	37
3	Bonet Engkabang	109	25
4	Bonet Lama	204	51
5	Gurung Kempadik	159	47
6	Kajang Baru	231	64
7	Laman Natai	424	126
8	Lebak Ubah	240	61
9	Manter	488	121
10	Melayang Sari	139	45
11	Merarai Dua	210	55
12	Merarai Satu	490	144
13	Nobal	110	27
14	Penjemang	193	55
15	Perembang	273	83
16	Ransi Dakan	182	45
17	Rarai	273	70
18	Sarai	286	60
19	Sungai Uko	461	107
	Jumlah	5036	1326

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di

Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2008 adalah di Desa Marter, Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Bonet Engkabang. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sintang Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Baning Kota	1130	310
2	Kapuas Kanan Hilir	650	154
3	Kapuas Kanan Hulu	1271	339
4	Kapuas Kiri Hilir	642	161
5	Kapuas Kiri Hulu	409	116
6	Ladang	427	129
7	Mungguk Bantok	364	104
8	Tanjung Puri	1152	308
9	Teluk Kelansam	404	101
10	Tertong	414	119
	Jumlah	6863	1841

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Sintang Tahun 2008 adalah di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Mungguk Bantok. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Dedai Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Dedai Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Baras	500	130
2	Empaci	415	118
3	Emparu Baru	928	228
4	Ganis	501	154
5	Kumpang	733	158
6	Lundang Baru	584	147
7	Mangat Baru	707	182
8	Menaong Baru	895	227
9	Nanga Dedai	395	115
10	Nanga Jetak	743	179
11	Pengkadan Baru	350	91
12	Pengkadan Sei Rupa	667	159
13	Penyak Lalang	231	83
14	Riguk	640	155
15	Sungai Mali	320	78
16	Tauk	448	107
Jumlah		9107	2311

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Dedai Tahun 2008 adalah di Desa Emparu Baru. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Penyak Lalang. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Jambu	348	76
2	Kerapa Sepan	406	93
3	Melingkat	1010	229
4	Mentunai	771	179
5	Nanga Mau	560	149
6	Nanga Tikan	194	54
7	Natai Tebedak	425	102
8	Nyangkom	456	116
9	Pakak	362	83
10	Pelaik	322	60
11	Sungai Buaya	569	128
12	Tertung Mau	215	51
13	Tuguk	543	129
	Jumlah	6181	1449

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2008 adalah di Desa Melingkat. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Tertung Mau. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin

dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kalam Permai Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kalam Permai Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Baning Panjang	860	241
2	Bengkuang	1500	353
3	Ensaid Panjang	316	72
4	Kebong	330	78
5	Merpak	728	163
6	Nanga Lebang	991	240
7	Pelimping	396	107
8	Sepan Lebang	450	112
9	Sungai Pukat	298	72
10	Sungai Maran	1133	297
	Jumlah	7002	1735

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Kalam Permai Tahun 2008 adalah di Desa Bengkuang. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Sungai Pukat. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Ampar Bedang	550	136
2	Binjai Hilir	408	122
3	Binjai Hulu	405	131
4	Dak Jaya	478	127
5	Mensiku	867	229
6	Sungai Risap	315	76
7	Telaga Dua	407	99
8	Telaga Satu	549	137
	Jumlah	3979	1057

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2008 adalah di Desa Mensiku. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Sungai Risap. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Air Nyuruk	855	194
2	Baung Sengalap	670	127
3	Kenuak	1126	261
4	Nanga Kemangai	541	142
5	Nanga Merkak	514	102
6	Nanga Sejirak	436	94
7	Semajau	394	83
8	Semuntai	347	79
9	Senibung	320	54
10	Setungkup	477	103
11	Sungai Deras	655	142
12	Sungai Mali	426	85
13	Tanjung Baung	204	43
	Jumlah	6965	1509

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2008 adalah di Desa Kenuak. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Tanjung Baung. Distribusi Penduduk, Penduduk

Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Argo Mulyo	552	157
2	Bagelang Jaya	1579	353
3	Gut Jaya Bakti	1591	339
4	Kerta Sari	1290	330
5	Marga Hayu	531	137
6	Panding Jaya	1757	417
7	Panggi Agung	648	158
8	Sumber Sari	393	112
9	Swadaya	671	148
10	Tanjung Sari	686	166
11	Tirta Karya	912	215
12	Wana Bhakti	1154	256
13	Wirayuda	968	238
	Jumlah	12741	3026

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008 adalah di Desa Gut Jaya Bakti. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Sumber Sari. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25. Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga Miskin
1	Empura	615	144
2	Jasa	836	201
3	Nanga Bayan	1006	217
4	Rasau	489	131
5	Sebadak	1541	287
6	Senaning	921	237
7	Sepiluk	1289	278
8	Suak Medang	1525	320
9	Sungai Seria	1165	232
Jumlah		9387	2047

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Di Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui Distribusi Penduduk, Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Desa di Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2008 adalah di Desa Sebadak. Sedangkan yang paling kecil adalah di Desa Empura.

2. Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang menyatakan, Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya Subsidi Pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2008. Tim Raskin Pusat mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kabupaten dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Biro Pusat Statistik (BPS).

Penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Sasaran Penerima Beras Program Beras untuk Keluarga Miskin Tahun 2008 dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kuantum Pagu RASKIN Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 1051 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 Perihal Penunjukan Personil Tim Beras Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008.

Selanjutnya, berdasarkan Kuantum Pagu Raskin masing-masing Kecamatan, Tim Raskin Kecamatan mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kelurahan/Desa, dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya ditetapkan Penerima Manfaat melalui Musyawarah Kelurahan/Desa. Hasil musyawarah Kelurahan/Desa disahkan Camat selaku Penanggungjawab Program Raskin di Kelurahan/Desa. Menurut Kepala PERUM BULOG Wilayah III Sintang, apabila Alokasi Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu Wilayah Kecamatan, maka Tim Raskin Kabupaten dapat merealokasi Pagu Raskin ke Wilayah lain sesuai dengan Tingkat Kewenangannya, apabila sampai dengan akhir Tahun terdapat sisa Pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa Pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada Tahun berikutnya (Hangus).

Apabila terdapat nama-nama penerima data Badan Pusat Statistik yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa/Kelurahan, maka dilakukan

musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu setiap Desa/Kelurahan Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari Rumah Tangga Miskin (RTM). Kreteria RTM yang dinyatakan tidak sesuai meliputi : penerima pindah tempat keluar Desa/Kelurahan, atau penerima yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan Sumber Datanya Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26. Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan Sumber Datanya Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Kecamatan	Sumber Data		Selisih
		BPS	Usulan Camat	
1.	Sintang	1.750	2.347	597
2.	Kelam Permai	2.219	3.125	906
3.	Binjai Hulu	1.324	1.820	496
4.	Sungai Tebelian	1.714	1.933	219
5.	Dedai	2.864	3.121	257
6.	Kayan Hilir	2.327	2.756	429
7.	Kayan Hulu	2.260	2.890	630
8.	Sepauk	2.871	3.103	232
9.	Ketungau Hilir	2.270	2.988	718
10.	Ketungau Tengah	3.434	3.778	344
11.	Ketungau Hulu	2.528	2.910	382
12.	Tempunak	2.738	3.011	273
13.	Serawai	3.408	3.932	524
14.	Ambalau	1.913	2.321	408
Jumlah		33.620	40.039	6.419

Sumber: Bagian Ekhang Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Mengacu pada Data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu 33.603 RTM dan selanjutnya Data tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 954 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Yang Menerima Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Berdasarkan Pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Kecamatan, Kelurahan/Desa melalui Forum Musyawarah Kelurahan/Desa menentukan Penerima Manfaat Raskin dengan cara menyeleksi/memverifikasikan nama-nama Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima Beras Raskin secara Transparan dan Partisipatif.

Menurut Camat, Hasil Musyawarah Desa telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Camat. Menurut Kepala Desa, pelaksanaan Musyawarah Desa mengikutsertakan Aparat Desa termasuk Kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT, PLKB, Badan Permusyawaratan Desa, Institusi Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin). Jumlah Penerima Manfaat Raskin telah dilaporkan secara berjenjang ke Tingkat Kecamatan, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Penerima Manfaat sesuai Tingkat Wilayahnya yang menjadi Dasar Pembuatan Surat Permintaan Alokasi oleh Bupati.

Realisasi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin kepada penerima manfaat (RTM) pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27. Realisasi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Kecamatan	Kuantum /Kg (10 bulan penyaluran)	Realisasi Penyaluran ke RTM (Kg)	Persentase (%)	Hasil Observasi
1.	Sintang	175.000	144.300	82,45	Beras yang tidak tersalurkan umumnya dijual ke para pedagang dengan harga yang lebih tinggi
2.	Kelam Permai	221.900	199.100	89,72	
3.	Binjai Hulu	132.400	112.000	84,59	
4.	Sei.Tebelian	171.400	158.329	92,37	
5.	Dedai	286.400	258.025	90,09	
6.	Kayan Hilir	232.700	152.450	65,51	
7.	Kayan Hulu	226.000	189.244	83,73	
8.	Sepauk	287.100	233.950	81,48	
9.	Ketungau Hilir	227.000	197.000	86,78	
10.	Ket. Tengah	343.400	300.400	87,47	
11.	Ketungau Hulu	252.800	211.000	83,46	
12.	Tempunak	273.800	221.245	80,80	
13.	Serawai	340.800	317.500	93,16	
14.	Ambalau	191.300	156.000	81,54	
Jumlah		3.362.000	2.850.543	84,78	

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi penyaluran beras untuk keluarga miskin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2008 cukup baik yaitu berkisar antara 65,51 % sampai dengan 93,16%. Kecamatan yang paling tinggi realisasinya adalah Kecamatan Serawai, kecamatan yang paling rendah adalah Kayan Hilir. Namun demikian, dari data pada Tabel 4.27 juga diketahui bahwa total beras yang tidak tersalurkan cukup banyak yaitu 511.457 kg.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beras yang tidak tersalurkan tersebut umumnya dijual ke pada para pedagang dengan harga yang lebih tinggi. Kalau dikalkulasikan dengan rata-rata harga jual Rp 2.500 per kg maka total nilai beras yang tidak tersalurkan adalah Rp 1.278.642.500 atau rata-rata Rp 91.331.607 setiap Kecamatan. Kondisi ini tentunya memungkinkan terjadinya kerawanan penyimpangan penyaluran di lapangan.

3. Angkutan Untuk Penyaluran Beras Keluarga Miskin

Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008 menggunakan 2 jenis sistem angkutan yaitu melalui sungai dan jalan darat. Adapun alat angkutan yang dipergunakan untuk pendistribusian program beras keluarga miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28. Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Waktu Tempuh
1	Sintang	jalan darat	mobil	5 km	15 menit
2	Kelam Permai	jalan darat	mobil	20 km	40 menit normal (jika kondisi jalan baik)
3	Dedai	jalan darat	mobil	25 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
4	Tempunak	jalan darat	mobil	21 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
5	Sungai Tebelian	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)
6	Sepauk	jalan darat	mobil	55 km	1,5 jam normal (jika kondisi jalan baik)
7	Kayan Hilir	jalan darat	mobil	76 km	3 jam normal (jika kondisi jalan baik)
8	Kayan Hulu	jalan darat	mobil	124 km	4 jam normal (jika kondisi jalan baik)
9	Serawai	sungai	motor air	189 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
10	Ambalau	sungai	motor air	203 km	3 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
11	Binjai Hulu	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)

sambungan Tabel 4.28.

No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Waktu Tempuh
12	Ketungau Hilir	sungai	motor air	65 km	1 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
13	Ketungau Tengah	sungai	motor air	103 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
14	Ketungau Hulu	sungai	motor air	216 km	4 hari normal (jika kondisi sungai pasang)

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang sangat tergantung pada faktor musim. Jika musim hujan, umumnya Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin adalah angkutan sungai. Jika musim kemarau Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin adalah angkutan darat. Beberapa Kecamatan seperti Sintang, Dedai, Kelam Permai, dan Sungai Tebelian tidak menghadapi masalah untuk angkutan tersebut.

Pada beberapa Kecamatan, karena kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi terhadap waktu tempuh untuk mendistribusikan beras raskin pada titik distribusi di ibukota masing-masing Kecamatan. Akibatnya, biaya yang diperlukan untuk masing-masing Kecamatan juga bervariasi. Kecamatan yang dapat diakses melalui

jalan darat, biaya distribusi relatif rendah. Kecamatan yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai biaya relatif tinggi. Biaya tersebut kemudian dibebankan pada harga beras yang dibeli oleh penerima manfaat.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang dilakukan melalui pengorganisasian secara lintas sektoral antar unit kerja. Dalam pengorganisasian tersebut, telah digariskan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja terkait. Pagu Raskin Kabupaten Sintang mengacu pada Data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya ditetapkan penerima manfaat melalui musyawarah Kelurahan/Desa. Guna mendukung distribusi Raskin di Kabupaten Sintang, Camat telah menindaklanjuti dengan menetapkan titik-titik distribusi di wilayah Kecamatan masing-masing.
2. Penentuan jumlah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang belum optimal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hampir seluruh indikator keberhasilan program raskin belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari indikator tepat sasaran, masih ditemui penerima manfaat bukan dikategorikan rumah tangga miskin. Dari indikator tepat jumlah, masih adanya jumlah beras raskin yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan jumlah yang sudah ditetapkan dalam satu tahun, penerimaan jatah beras tidak sampai 12 kali. Dari indikator tetap harga, juga belum

terlaksana, karena harga yang sampai ke titik distribusi yang telah disepakati melebihi Rp. 1.600,00/Kg. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin tidak pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti.

B. Saran

1. Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di harapkan dapat disederhanakan dan tidak berbelit-belit, dimana untuk pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah III Sintang cukup melalui Camat masing-masing. Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan memberikan subsidi pada APBD untuk angkutan raskin baik sampai di ibukota Kecamatan maupun Desa. Hal ini dimaksudkan agar biaya angkutan tidak dibebankan lagi pada harga beras yang dibeli oleh penerima manfaat.
2. Penentuan jumlah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang diharapkan berdasarkan data yang akurat/valid. Hal ini disebabkan penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima pendistribusian program beras untuk keluarga miskin tidak dilakukan berdasarkan indikator-indikator kemiskinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPS, sehingga hampir seluruh indikator keberhasilan program raskin tidak dapat terlaksana baik indikator tepat sasaran, indikator tepat jumlah, indikator tepat harga, maupun pengaduan masyarakat berupa keluhan,

kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin tidak pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (1997). *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashari, ET. (2003). *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Era Persaingan Bebas*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- Bappeda Kabupaten Sintang. (2005). *Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten Sintang*. Sintang: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Dipohusodo. (1996). *Evaluasi Proyek Konstruksi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Handoko, TH. (2000). *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Irawan, P. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy, M.I. (1988). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunika UT
- Jones, C. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/4329/Ekon. A Tanggal 29 Desember 2005, Perihal Pendistribusian Beras RASKIN Tahun 2006 Di Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Bupati Sintang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penentuan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima Pendistribusian Program Beras Untuk Keluarga Miskin pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2006
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nugroho, D.R. (2003). *Kebijakan Publik Formulai, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pusdiklat BPKP. (2000). *Pengendalian Manajemen Pemerintahan*. Jakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009. (tidak diterbitkan)
- SMERU. (2004). *Memahami Suara Orang Miskin*. Jurnal SMERU Volume 11 Juli-September 2004. Jakarta:SMERU.
- Sumardi, M. dan Evers. (1982). *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV Rajawali
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2919/SJ Tanggal 29 Oktober 2004, Perihal Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RASKIN
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/4329/Ekon. A Tanggal 29 Desember 2005, Perihal Pendistribusian Beras RASKIN Tahun 2006 Di Provinsi Kalimantan Barat
- Suryabrata,S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thamrin. (1997). *Kebijaksanaan Negara Suatu Pengantar*. Pontianak: Fisipol UNTAN.
- Thoha. M. (1992). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. S. (1997). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S dan Pramusinta, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gadjahmada.
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Lampiran 1 Pedoman Observasi (Daftar Chek List) Untuk Pengamatan Lapangan

**PEDOMAN OBSERVASI (DAFTAR CHEK LIST)
UNTUK PENGAMATAN LAPANGAN**

I. Tata Cara Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

A. Tata Cara Pengorganisasian Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

No	Tata Cara Pengorganisasian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pembentukan organisasi pelaksana	√		SK Bupati Sintang No.953 Tahun 2007
2	Pembagian tugas dan pekerjaan	√		
3	Koordinasi pelaksanaan	√		

B. Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat

No	Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Perhitungan pagu jatah	√		
2	Pendataan penerima manfaat	√		
3	Dasar hukum perhitungan pagu jatah	√		SK Bupati Sintang No.954 Tahun 2007
4	Dasar hukum penerima manfaat	√		SK Bupati Sintang No.954 Tahun 2007

C. Tata Cara Distribusi

No	Tata Cara Distribusi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Penentuan distribusi dari Dolog ke Titik Distribusi Kecamatan	√		Ditentukan oleh Dolog dan Camat
2	Penentuan Titik Distribusi Kecamatan ke Titik Distribusi Desa	√		Ditentukan oleh Camat
3	Penambahan biaya/ongkos angkut	√		Berdasarkan musyawarah

II. Pencapaian tujuan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

A. Pencapaian indikator keberhasilan program

No	Indikator Keberhasilan	Uraian	Realisasi Lapangan
1	Tepat Sasaran Penerima Manfaat	RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat	Mengacu pada Data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu 33.603 rumah tangga miskin. Raskin banyak diterima oleh Rumah Tangga yang tidak berhak
2	Tepat Jumlah	Jumlah Beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah maksimal sebanyak 10 Kg/TM/bulan selama 12 (dua belas) bulan	Masih ada rumah tangga yang menerima Raskin kurang dari 10 Kg/RTM/bulan selama 12 (dua belas) bulan
3	Tepat Harga	Harga Beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi	Harga Beras RASKIN di atas Rp. 1.600,-/Kg di Titik Distribusi yaitu Rp 2.000 ke atas,
4	Tepat Waktu	Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi	Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) belum sesuai dengan Rencana Distribusi (selalu terlambat)
5	Tepat Administrasi	Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu	Persyaratan administrasi tidak tertib dan kurang lengkap

B. Pemantauan, Evaluasi Dan Pengaduan Masyarakat

No	Pemantauan, Evaluasi Dan Pengaduan Masyarakat	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Kegiatan monitoring/pemantauan	√		Tidak optimal
2	Pelaksanaan evaluasi	√		Tidak optimal
3	Pengaduan masyarakat	√		Kurang ditanggapi

UNIVERSITAS TERBUKA

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Pelaksana	Tugas	Pelaksanaan Tugas
1.	Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008	Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pemantauan Raskin di Kabupaten Sintang	Tugas dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat penetapan Keputusan Penerima Manfaat, pendistribusian dan evaluasi pelaksanaan. Rapat dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi, aspek yang dibahas adalah kesiapan pelaksanaan serta kendala yang dihadapi. Kunjungan lapangan oleh Tim jarang dilakukan
2.	Perum Bulog Wilayah III Sintang	Penanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun penyelesaian Administrasi dan Pembayaran	Tugas dilaksanakan hanya dengan mengeluarkan beras dari gudang Dolog. Kunjungan lapangan jarang dilakukan
3.	Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang	Penanggungjawab Penyediaan Data Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Penerimaan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin	Penyediaan data umumnya bersumber dari data sekunder
4.	Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang	Penanggungjawab menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang	menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang dengan SK Bupati
5.	Camat, Lurah/Kepala Desa	Penanggungjawab Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM), maupun penyelesaian Administrasi Pembayaran	Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTM), maupun penyelesaian Administrasi Pembayaran melibatkan pihak ketiga
6.	Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang	Kurang di kenal masyarakat, sehingga pengaduan lebih banyak ke kepolisian dan kejaksaan

Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Bulan	Peserta Yang Diundang	Jumlah Peserta Yang Hadir	Keterangan
1	Sintang	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 119 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua peserta dari Desa hadir • Sosialisasi diwarnai interupsi peserta mengenai data yang tidak cocok • Adanya keluhan terhadap pelaksanaan Raskin Tahun sebelumnya
2	Sepauk	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 84 orang	
3	Tempunak	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 52 orang	
4	Sungai Tebelian	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 47 orang	
5	Dedai	Januari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 79 orang	
6	Kelam Permai	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 66 orang	
7	Kayan Hilir	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 71 orang	
8	Kayan Hulu	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 39 orang	
9	Serawai	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 72 orang	
10	Ambalau	Februari 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 26 orang	
11	Binjai Hulu	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 46 orang	
12	Ketungau Hilir	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 51 orang	
13	Ketungau Tengah	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 87 orang	
14	Ketungau Hulu	Maret 2008	Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat	Sebanyak 63 orang	

Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Pendistribusian Program Beras Keluarga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Waktu Tempuh
1	Sintang	jalan darat	mobil	5 km	15 menit
2	Kelam Permai	jalan darat	mobil	20 km	40 menit normal (jika kondisi jalan baik)
3	Dedai	jalan darat	mobil	25 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
4	Tempunak	jalan darat	mobil	21 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
5	Sungai Tebelian	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)
6	Sepauk	jalan darat	mobil	55 km	1,5 jam normal (jika kondisi jalan baik)
7	Kayan Hilir	jalan darat	mobil	76 km	3 jam normal (jika kondisi jalan baik)
8	Kayan Hulu	jalan darat	mobil	124 km	4 jam normal (jika kondisi jalan baik)
9	Serawai	sungai	motor air	189 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
10	Ambalau	sungai	motor air	203 km	3 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
11	Binjai Hulu	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)
No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Waktu Tempuh
12	Ketungau Hilir	sungai	motor air	65 km	1 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
13	Ketungau Tengah	sungai	motor air	103 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
14	Ketungau Hulu	sungai	motor air	216 km	4 hari normal (jika kondisi sungai pasang)

Lampiran 2 Rangkuman Transkrip Hasil Wawancara Dengan Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang

Nama Mahasiswa : DRS.H.ZULKIFLI, HA.
 NIM : 014946249
 Judul : Analisis Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Sintang Tahun 2008
 Nama Yang : Syarif Alwi, SH (Kepala PERUM BULOG Sub Divre Diwawancara Wilayah III Sintang)
 Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2009
 Tempat : Kantor PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang

Rumusan masalah:

Bagaimanakah tata cara penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008

Pokok Bahasan:

Tata cara penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008

Sub Pokok Bahasan:

A. Tata Cara Pengorganisasian Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah mekanisme pengorganisasian penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang?

Mekanisme dibuat secara bertingkat, yaitu tingkat Kabupaten dibuat oleh Bupati setelah menerima surat edaran resmi dari Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat Kecamatan dibuat oleh Camat setelah menerima surat edaran dari Bupati Sintang. Tingkat Desa dibuat oleh Kades setelah menerima surat dari Kecamatan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam pengorganisasian penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang?

Untuk tingkat Kabupaten yaitu: Bupati sebagai penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai wakil penanggungjawab, Sekda Kab.Sintang sebagai Ketua, Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kab.Sintang sebagai Wakil Ketua, Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang sebagai koordinator pelaksana, Kepala BPS Sintang sebagai wakil koordinator, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Sintang sebagai sekretaris, Kepala Seksi Komersil PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang sebagai wakil sekretaris dan lainnya sebagai anggota.

3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengorganisasian penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang?

Masyarakat dilibatkan dalam pengorganisasian di tingkat Desa yaitu TP-PKK, Lembaga Kemasyarakatan yang ada, RT, Kepala Dusun dan lain-lain yang dipertikan.

B. Tata Cara Penentuan Pagu Jatah Dan Penerima Manfaat

1. Bagaimanakah mekanisme penentuan pagu jatah bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang?

Penentuan pagu Raskin Kab Sintang adalah dari pusat melalui keputusan Menteri dalam Negeri atas dasar data BPS pusat , sedangkan untuk Kecamatan/desa adalah dari data BPS Kabupaten.

2. Bagaimana mekanisme penentuan penerima manfaat Bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang :
Penerima manfaat bantuan beras untuk keluarga miskin dari data BPS Kabupaten.
3. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan pagu jatah Bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang :
Yaitu petugas lapangan dari BPS Kabupaten.
4. sama dengan nomor 3 diatas
5. Apakah penentuan pagu jatah sudah sesuai dengan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sintang?
Penentuan pagu jatah belum sesuai dengan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sintang.
6. Apakah penentuan jumlah penerima manfaat sudah sesuai dengan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sintang
Penentuan jumlah penerima manfaat belum sesuai dengan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sintang.

C. Tata Cara Distribusi

1. Apakah dalam penyaluran Bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah dibuat perencanaan distribusi ?
Dalam penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah dibuat perencanaan distribusi .
2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan distribusi tersebut ?
Yaitu Tim Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Wil III Sintang dan Tim Pelaksana Distribusi yang dibentuk oleh Camat.
3. Bagaimanakah Pelaksanaan administrasi distribusi penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang
Pelaksanaan administrasi distribusi penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang yaitu sesuai dengan Juknis yang dibuat Bupati Sintang atas dasar Pedum Raskin tahun 2008, ditambah dengan Juklak yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Barat serta disesuaikan dengan kondisi daerah (Juknis dibuat sesuai petunjuk dari Pedum) yaitu
 - Bupati mengajukan surat permintaan Alokasi (SPA) Raskin ke Sub Divre Wil III Sintang untuk masing-masing Kecamatan per Alokasi.
 - Atas dasar SPA Bupati tersebut Camat juga mengajukan SPA untuk masing-masing Desa per Alokasi.
 - Atas dasar SPA Camat Perum Bulog Sub Divre Wil III Sintang menerbitkan surat perintah pengeluaran Barang/Dilevry Order (SPPB/DO) beras atas nama Kecamatan / Desa yang ditujukan kepada Satker Perum Bulog Sub Divre Wil III Sintang
 - Berdasarkan SPPB/ Do tersebut, satuan kerja (Satker) mengambil beras di Gudang dan mengantarkannya ke Kecamatan/Desa sesuai titik distribusi yang disepakati dan menyerahkannya ke Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras sebagai pengalihan tanggung jawab dari Tim Satker ke Tim Pelaksana Distribusi.
 - Berdasarkan BAST tersebut Perum Bulog membuat Rekapitulasi Berita Acara masing-masing Kecamatan (Format MBA-0) yang ditanda tangani Ketua Tim

- Satker Raskin dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan serta diketahui Camat atau Pejabat yang mewakili.
- Kemudian berdasarkan MBA-0 dari masing-masing Kecamatan Perum Bulog membuat rekapitulasi untuk per Kabupaten (Format MBA-1) yang ditanda tangani Kepala Perum Bulog Sub Divre Wil III Sintang dan Bupati atau pejabat yang mewakili dan seorang saksi dari anggota Tim Raskin Kabupaten Sintang .

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi distribusi penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang.

Yaitu Tim Satker Raskin Perum Bulog dan Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/desa

II

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pencapaian tujuan penyaluran Bantuan beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang tahun 2008.

Pokok Bahasan

Pencapaian tujuan penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang tahun 2008.

Sub Pokok Bahasan

A. Pencapaian indikator keberhasilan program

Pertanyaan :

1. Apakah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat sasaran penerima manfaat?

Hampir tepat sasaran mungkin sudah mencapai 95 %

2. Apakah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat jumlah penerima manfaat

Hampir tepat jumlah mungkin mencapai 95 %

3. Apakah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat harga.

Harga sudah tepat sesuai harga tebus Rp 1.600,00/kg di titik distribusi.

4. Apakah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat waktu.

Belum tepat karena kondisi alam .

5. Apakah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat Administrasi.

Administrasinya sudah tepat semuanya karena dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada dan di control oleh Pengawas Intern (SPI) dan pengawas extern (BPK).

B. Pemantauan, Evaluasi dan pengaduan Masyarakat.

Pertanyaan :

1. Bagaimana tata cara Pemantauan penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang ?

Dibuat programnya oleh Tim Raskin Kabupaten yaitu tiap 6 bulan sekali turun kelapangan untuk seluruh kecamatan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam pemantauan tersebut ?

Yang terlibat dalam pemantauan tersebut adalah anggota Tim Raskin Kabupaten.

3. Bagaimanakah tata cara evaluasi penyahuran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang ?
Evaluasi dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten juga yaitu tiap 6 bulan sekali.
4. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut ?
Anggota Tim Raskin Kabupaten juga
5. Bagaimana tata cara pengaduan masyarakat dalam penyahuran bantuan beras untuk keluarga miskin di kabupaten Sintang ?
Untuk pengaduan Masyarakat Bupati membentuk Tim yaitu Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
6. Siapa saja yang terlibat dalam pengaduan tersebut ?
Yaitu Kepala Dinas Sosial Kab Sintang , Kepolisian , Kejaksaan , dan anggotanya Tim Raskin Kabupaten Sintang.

Sintang, tahun 2009
Yang menjawab pertanyaan


Bupati Sintang

Svarif Alwi, SH

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3 : Rangkuman Transkrip Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Drs. H. ZULKIFLI. HA
 NIM : 014946249
 JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
 DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008
 NAMA YANG DIWAWANCARA : Ir. ZULKARNAEN, M.Si
 HARI/TANGGAL : SENIN/TANGGAL 18 MEI 2009
 TEMPAT : RUANG KEPALA BAGIAN EKBANG KANTOR BUPATI SINTANG

No	Jawaban
I. A.1	<p>Mekanisme pengorganisasian penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggungjawab pelaksanaan dan pemantauan RASKIN di Kabupaten Sintang adalah Bupati Sintang yang secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian Beras dari gudang beras Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya, adalah Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang sesuai tingkat wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (SATKER) RASKIN. Penanggungjawab penyediaan data dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai referensi musyawarah Desa/Kelurahan dalam penetapan Keluarga sasaran penerima manfaat RASKIN adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang. Penanggungjawab menetapkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kuantum Beras RASKIN di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang adalah Bupati Sintang dengan Keputusan Bupati Sintang. Penanggungjawab pendistribusian Beras RASKIN dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat RASKIN (PTM), maupun penyelesaian administrasi pembayarannya, adalah Camat, Lurah/Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi dan dipantau oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan, Sosialisasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008, dan Kecamatan. Penetapan penerima manfaat Program Beras RASKIN sebagai hasil musyawarah Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat, selaku penanggungjawab Program Beras RASKIN di Kelurahan/Desa. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang adalah Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dibentuk oleh Bupati Sintang.

A.2	Yang terlibat dalam pengorganisasian penyaluran bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2008, adalah sebagai berikut :																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 347 845 380">Nama/Jabatan</th> <th data-bbox="845 347 1452 380">Kedudukan Dalam Tim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 380 845 414">1. BUPATI SINTANG</td> <td data-bbox="845 380 1452 414">PENANGGUNG JAWAB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 414 845 436">2. WAKIL BUPATI SINTANG</td> <td data-bbox="845 414 1452 436">WAKIL PENANGGUNG JAWAB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 436 845 459">3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 436 1452 459">KETUA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 459 845 504">4. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 459 1452 504">WAKIL Ketua</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 504 845 526">5. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG</td> <td data-bbox="845 504 1452 526">KOORDINATOR PELAKSANA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 526 845 548">6. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 526 1452 548">WAKIL KOORDINATOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 548 845 593">7. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 548 1452 593">SEKRETARIS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 593 845 616">8. KEPALA SEKSI KOMERSIL PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG</td> <td data-bbox="845 593 1452 616">WAKIL SEKRETARIS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 616 845 638">9. KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 616 1452 638"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 638 845 660">10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 638 1452 660">KOORDINATOR BIDANG DISTRIBUSI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 660 845 705">11. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 660 1452 705">ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 705 845 728">12. KEPALA SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 705 1452 728">ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 728 845 750">13. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 728 1452 750">ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 750 845 772">14. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 750 1452 772">ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 772 845 817">15. TETI SUHARNI,SP.MM STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 772 1452 817">ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 817 845 862">16. HALIMATUSALAH STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG</td> <td data-bbox="845 817 1452 862">ANGGOTA</td> </tr> </tbody> </table>	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	1. BUPATI SINTANG	PENANGGUNG JAWAB	2. WAKIL BUPATI SINTANG	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	KETUA	4. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	WAKIL Ketua	5. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG	KOORDINATOR PELAKSANA	6. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SINTANG	WAKIL KOORDINATOR	7. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	SEKRETARIS	8. KEPALA SEKSI KOMERSIL PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG	WAKIL SEKRETARIS	9. KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SINTANG		10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	KOORDINATOR BIDANG DISTRIBUSI	11. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA	12. KEPALA SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA	13. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA	14. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA	15. TETI SUHARNI,SP.MM STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA	16. HALIMATUSALAH STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim																																		
1. BUPATI SINTANG	PENANGGUNG JAWAB																																		
2. WAKIL BUPATI SINTANG	WAKIL PENANGGUNG JAWAB																																		
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	KETUA																																		
4. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	WAKIL Ketua																																		
5. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG	KOORDINATOR PELAKSANA																																		
6. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SINTANG	WAKIL KOORDINATOR																																		
7. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	SEKRETARIS																																		
8. KEPALA SEKSI KOMERSIL PERUM BULOG SUB DIVRE WIL. III SINTANG	WAKIL SEKRETARIS																																		
9. KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SINTANG																																			
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	KOORDINATOR BIDANG DISTRIBUSI																																		
11. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
12. KEPALA SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
13. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
14. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
15. TETI SUHARNI,SP.MM STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
16. HALIMATUSALAH STAF BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA																																		
A.3	Masyarakat secara langsung tidak terlibat dalam pengorganisasian penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang, namun masyarakat terlibat secara aktif dalam penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang mulai dari penentuan titik distribusi Raskin sampai dengan Penyaluran Raskin sampai ke tangan RTM.																																		
B.1	<p>Mekanisme penentuan pagu jatah Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tim Raskin Pusat mengalokasikan pagu untuk masing-masing Provinsi berdasarkan data RTM dari BPS dan Kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008. Tim Raskin Provinsi menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada Pagu Raskin dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten/Kota. Berdasarkan kuantum pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota, Tim Raskin Kabupaten/Kota menetapkan pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui Keputusan Bupati/Walikota, dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten/Kota dan data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS dan selanjutnya ditetapkan penerima manfaatnya melalui forum musyawarah desa sesuai dengan kondisi objektif daerah. Hasil musyawarah desa/kelurahan disahkan oleh Camat selaku penanggungjawab Program Raskin di Desa/Kelurahan. 																																		

	<p>d. Apabila Pagu Raskin disuatu Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak di distribusikan sesuai yang direncanakan, maka Tim Raskin Kabupaten/Kota dapat merealokasikan pagu Raskin ke Kecamatan/Desa/Kelurahan lain yang dinilai lebih membutuhkan dan kinerjanya baik.</p> <p>e. Apabila pagu Raskin disuatu Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai tanggal 31 Desember 2008, maka sisa pagu tersebut tidak disalurkan pada tahun 2009.</p>
B.2	<p>Mekanisme penentuan penerima manfaat Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah :</p> <p>a. Berdasarkan pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota; Desa Kelurahan melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan menentukan Penerima Manfaat Raskin dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak Raskin secara transparan dan partisipatif.</p> <p>b. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa dan dihadiri oleh Aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan, RW,RT), PLKB, anggota Badan Permusyawaratan Desa / Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Desa/Kelurahan,PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan RTM.</p> <p>c. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin) (Format DPM-1) yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat setempat. Rumah Tangga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa Kartu Raskin atau identitas berupa tanda tertentu.</p> <p>d. Jumlah Penerima Manfaat Raskin setiap Desa/Lurah dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kabupaten / Kota dan Provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (Format SPA) oleh Bupati /Walikota setempat.</p> <p>e. Daftar Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa/Kelurahan.</p>
B.3	<p>Yang terlibat dalam penentuan pagu jatah Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah Tim Raskin Kabupaten/Kota yang menetapkan Pagu Raskin masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui Keputusan Bupati Sintang, dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten/Kota dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS dan selanjutnya ditetapkan penerima manfaatnya melalui Forum Musyawarah Desa Sesuai dengan kondisi objek di daerah. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan disahkan oleh Camat selaku penanggungjawab Program Raskin di Desa/Kelurahan.</p>
B.4	<p>Yang terlibat dalam penentuan Penerima Manfaat Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdiri dari Aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan, RW,RT), PLKB, anggota Badan Permusyawaratan Desa / Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Desa/Kelurahan,PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan RTM , berdasarkan Pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang</p>
B.5	<p>Dalam Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2008, penentuan pagu jatah dan jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah sesuai.</p>

B.6	Dalam Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2008, penentuan jumlah Penerima Manfaat sudah sesuai jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang.
C.1	Dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2008, sudah dibuat perencanaan distribusinya, yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan : a. Situasi, kondisi dan kebutuhan daerah setempat, b. Penghentian sementara distribusi Raskin jika pada puncak panen raya padi (2 bulan). c. Label kemasan beras adalah "Beras Raskin", jika persediaan tidak ada/habis dapat menggunakan beras bertabel "Beras Bulog".
C.2	Yang terlibat dalam perencanaan Distribusi adalah Tim Raskin Kabupaten, Perum Bulog, Tim Raskin Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan penanggung jawab distribusi dan Gudang Dolog kefitik distribusi adalah pihak Perum Bulog Kabupaten Sintang .
C.3	Administrasi pelaksanaan distribusi Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Adalah : a. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Desa/Kelurahan/Kecamatan. b. Berdasarkan BAST, Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang membuat rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan RASKIN masing-masing Kecamatan (Format MBA-O) yang ditanda tangani SATKER RASKIN Sub Divre Wilayah III Sintang dan Tim RASKIN Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. c. Berdasarkan MBA-O Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN per Kabupaten (Format MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang dan Bupati Sintang atau Pejabat yang mewakili dan seorang saksi dari anggota Tim RASKIN Kabupaten Sintang. Nama dan identitas penandatanganan harus jelas dan disertai cap/ stempel. Pembuatan MBA-1 selesai ditanda tangani dikirim ke Divisi Regional Wilayah III Sintang dengan lampiran Copy SPA dan Rekap DO (MDO).
C.4	Yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi distribusi penyaluran bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang adalah : a. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) RASKIN kepada Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang berdasarkan alokasi jumlah RTM dan kuantum beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Sintang. b. Untuk kelengkapan dan terfih administrasi Camat juga mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang berdasarkan alokasi jumlah RTM dan kuantum beras untuk masing-masing Kelurahan/Desa di Wilayahnya. c. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) , tersebut bulir 1 dan 2 selanjutnya Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras atas nama Kecamatan/Kelurahan/Desa dimaksud kepada Satuan Kerja (SATKER) RASKIN Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang.

		<p>d. Surat Permintaan Alokasi (SPA) bulan/periode tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu, dapat dilayani dengan SPA tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi dilakukan dengan menerbitkan SPA baru yang merujuk pada SPA lama yang belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebut harus dipisahkan dengan SPA rutin bulan berjalan.</p> <p>e. Berdasarkan SPBB/DO, Satuan Kerja (SATKER) RASKIN mengambil beras di gudang beras Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang, untuk mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi yang disepakati. Kualitas Beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas Perum BULOG yang telah ditentukan. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.</p> <p>f. Serah terima beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (Format BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.</p> <p>g. Camat/Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab atas diterimanya beras sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat. Camat/Lurah/Kepala Desa wajib mengawasi proses pelaksanaan pendistribusian Kepala Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi.</p>
II.	A.1	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang belum sepenuhnya Tepat Sasaran bagi Penerima Manfaat.
	A.2	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang belum sepenuhnya Tepat Jumlah Penerima Manfaat.
	A.3	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Sudah Tepat Harga sampai di Titik Distribusi.
	A.4	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang belum Tepat Waktu.
	A.5	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang Sudah Tepat Administrasi.
	B.1	<p>Tata cara pemantauan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang adalah :</p> <p>a. Pemantauan Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program RASKIN.</p> <p>b. Pelaksanaan Pemantauan dilakukan oleh Tim RASKIN Kabupaten dan Tim RASKIN Kecamatan dan dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>c. Waktu Pemantauan dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>e. Hasil Pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim RASKIN Kabupaten atau Tim RASKIN Kecamatan secara berkala untuk diindak lanjuti</p>
	B.2	Yang terlibat dalam pemantauan adalah Tim Raskin Kabupaten, Tim Raskin Kecamatan dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
	B.3	<p>Tata cara evaluasi Penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang adalah :</p> <p>a. Evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program RASKIN.</p> <p>b. Pelaksanaan Evaluasi Program RASKIN dilakukan oleh Tim RASKIN Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan dan dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Institusi/Lembaga lain sesuai kebutuhan.</p>

	<p>c. Waktu Evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Hasil evaluasi Program RASKIN dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada Penanggungjawab Program RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.</p>
B.4	Pelaksanaan Evaluasi Program RASKIN di Kabupaten Sintang dilakukan oleh Tim RASKIN Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan dan dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Institusi/Lembaga lain sesuai kebutuhan.
B.5	<p>Tata cara pengaduan masyarakat dalam penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Sintang adalah :</p> <p>a. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program RASKIN ditanggapi dan difindak lanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim RASKIN Kabupaten dan Tim RASKIN Kecamatan sesuai tingkatan wilayahnya.</p> <p>b. Penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sintang secara fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan di Kabupaten Sintang, sedangkan Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi sampai menindaklanjuti untuk pengaduan/keluhan yang terkait dengan internal Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang.</p> <p>c. Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidak serasian dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Sintang secara teknis dapat diselesaikan oleh Tim RASKIN di setiap tingkatan melalui Unit Pengaduan Masyarakat</p> <p>d. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat berasal dari Penerima RASKIN atau masyarakat umum secara langsung atau melalui media massa cetak dan elektronik (Surat Kabar, Televisi, dan Radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Faksimile, E-mail, Telepon, Laporan dari kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga independent, Perguruan Tinggi/Institusi kemasyarakatan yang terkait lainnya.</p>
B.6	Penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sintang secara fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan di Kabupaten Sintang, sedangkan Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi sampai menindaklanjuti untuk pengaduan/keluhan yang terkait dengan internal Perum BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang.

Sintang, Mei 2009

KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG,



IR. ZULKARNAEN, M.SI
PEMBINA

NIP. 19611107 199303 1 006

CATATAN HASIL WAWANCARA
TERHADAP WARGA PENERIMA MANFAAT BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2009

1. Nama : DAKUN
Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Puang / 14 Mei 1962
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Nanga Merakai
- Apa Kabar Pak ? Baik-baik saja, Pak saya ingin ngomong-ngomong dengan bapak sebentar saja. Begini pak,
Apakah bapak pernah dapat jatah beras untuk keluarga miskin yang kita sebut raskin ? oh pernah pak,
Berapa jumlah yang diteima ? tidak tentu, biasanya 15 Kg dan biasjuga 10 Kg.
Berapa perkilonya ? Rp. 1.600,- / kg tetapi ditambah upah angkut sampai kekampung Rp. 2.500,- sampai Rp 3.500,- tergantung kesepakatan.
Apakah setiap bulan diterima ? oh tidak pak, kadang-kadang 3 bulan sekali paling cepat 2 bulan.
2. Nama : RENGAN
Tempat / Tgl. Lahir : 14 September 1967
Agama : Kristen
Alamat : Nanga Lemetak Kec. Ketungau Tengah.
- Selamat siang pak ? siang, siapa nama duan, nama aku Rengan, sehat-sehat saja duan pak ? sehat, Saya ingin tanya kepada duan,
Apakah pernah Membeli Beras untuk orang miskin atau raskin ? oh pernah,
Biasanya berapa Kg duan dapat ? tidak tentu, kadang-kadang 10 kg biasjuga sampai 15 kg tergantung karena sistem kami di kampung ini biasanya dibagi rata.
Berapa harga beras sebenarnya ? Rp 1.600,- / kg tetapi ongkos angkut atas kesepakatan kami di kampung yang kadang-kadang lebih dari Rp. 1.600,-

Berapa bulan sekali dapat beras itu ? ndak tentu, kadang-kadang sebulan sekali pernah sampai 3 sampai 4 bulan baru ada.

3. Nama : DAYANG NUR
 Tempat / Tgl. Lahir : Sintang, 1943
 Agama : Islam
 Alamat : RT. 07.RW III Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kec.
 Sintang.

Assalamuallaikum bu, apa kabar tuh ? Baik-baik aja, Bu dayang, saya nak nanya bu,

Pernah ibu dapat beras untuk orang miskin yang di sebut raskin ? oh pernah.

Berapa banyak ? paling banyak 15 kg biasa juga kurang.

Berapa harganya ? Rp. 2.000,- sampai Rp. 2.500,- karena kaitanya untuk menambah uang angkut sampai ke kampong kami dan sebenarnya harga Rp. 1.600,- / kg.

Apakah tiap bulan ibu terima ? ndak tentu tergantung pak Lurah dengan Doloklah.

4. Nama : A.SIKIN
 Tempat / Tgl. Lahir : Sintang / 1946
 Agama : Islam
 Alamat : RT 06 / RW II Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Sintang.

Assalamuallaikum pak, Maaf pak saya mau nanya ini tentang raskin, sapai nama duan ? Sikin, Begini pak Sikin,

Pernah endak duan dengar Raskin ? oh pernah, itukan beras untuk oaring miskin.

Nah apa duan pernah dapat ? pernah.

Berapa banyak duan dapat ? Paling banyak 15 kg, tetapi tiap tahun berubah kadang-kadang 10 kg kadang-kadang juga lebih.

Kalau harganya berapa ? Berkisar Rp. 1.600,- / kg.tetapi untuk upah angkut di kompromikan dulu, jadi harga Berkisar Rp. 2.000,- / kg. Biasalebih dan biasakurang.

Apakah setiap bulan di terima ? tidak mesti datang setiap bulan, untuk mendapatkan beras ini pak lurah harus mengurusnya dulu ke gudang dolog. Baiklah pak sikin terima kasih.

5. Nama : BODENG
 Tempat / Tgl. Lahir : Lekakawi, 27 Oktober 1958
 Agama : Khatolik
 Alamat : Desa karya jaya Kec. Serawai.

Selamat pagi pak, sapa nama duan tu ? Bodeng, sehat jak pak ? Ia, sehat. Maaf pak saya mau nanya ini tentang raskin, itu pak beras untuk orang miskin, oh, itukan beras untuk kami,

Nah pernah endak bapak dapat beras raskin ? pernah.

Berapa banyak ? antara 10 kg sampai 15 kg.

Berapa harga per kg duan bayar ? sekitar Rp 3.700,- sampai Rp. 4.000,- / kg tidak tentu karena ada uang tambahan ongkos angkutan kalu sampai ke kecamatan Rp. 1.600,-

Apakah bapak terima setiap bulan ? tidak tentu tergantung di air surut bisa sampai 3, 4 bulan baru datang beras.

Oh begitu terima kasih pak informasinya.

6. Nama : LENA
 Tempat / Tgl. Lahir : Mentajoi, 6 Februari 1952
 Agama : Protestan
 Alamat : Desa Mentajoi Kec. Serawai

Selamat siang bu, apa kabar sekarang bu ? baik-baik aja. Maaf bu boleh saya Tanya sebentar, nama ibu ? nama saya Lena, oh ibu lena, sudah lama ibu tinggal di mentajoi ? sudah lama hidup di kampung ini. Begini bu Lena,

Apakah Ibu dapat beras raskin ? oh biasa.

Berapa Banyak ibu dapat beras raskin ? tidak tentu kadang-kadang 9 kg, 10 kg bisa juga 15 kg per orang, ini tergantung karena kami dikampung ini di bagi rata agar dapat semua.

Berapa harga per kg ? Biasanya Rp 3.700,- kg kadang-kadang bisa mencapai Rp 4.000,- / kg tergantung kesepakatan kami untuk bayar ongkos angkut beras sampai kampung. Kalu bisa pak raskin itu di beri gratis saja. Oh ia, begitu ia bu. Terima kasih atas informasinya saya pamit dulu.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA	: SEWEL
2. TEMPAT/TGL LAHIR	: Sepauk, 09-11-1951
3. AGAMA	: Islam
4. ALAMAT	: Desa Nanga Sepauk.

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : :
..... *10 kg*
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
Rp. *2600*
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : *Minta di pertanyakan jumlahnya*
untuk beras kelaur buss yang bagus

 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ? *Perlu*
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu ,
diberikan secara gratis tanpa pembayaran ? *kalau buss gratis*
atau harga minta di turunkan
 - c. Bagaiman jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai
pendapat bapak / Ibu ? *boleh di ganti asalkan program*
tersebut langsung di rasakan kami masyarakat
miskin

1. Name : SEWEL
2. Hari /Tgl : Jum'at / 22 Mei 2009
3. Tempat : Desa Nanga Sepauk.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : MURJIUN
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sepauk.00-00-1954
 3. AGAMA : ISLAM
 4. ALAMAT : Dsn.19 Sepauk
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) **Sudah**
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : :
15 (Lima belas) kg
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
Rp. 1600
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : **Sangat di butuhkan bagi rakyat miskin**
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ? **Sangat Perlu**
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran ? **Perlu**
- c. Bagaiman jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat bapak / Ibu ? **tidak setuju**

1. Nama : MURJIUN
 2. Hari / Tgl: Jum'at / 22 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Nanga Sepauk

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : M. SAAD .
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sepauh, 01-07-1950 .
 3. AGAMA : Islam
 4. ALAMAT : Desa Nanga Sepauh .
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya :
10 kg
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
 Rp. *2600*
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
Sangat baik kalau perlu di berikan juga jumlah kg nya
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ?
Perlu
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran ?
Kalau dapat di berikan secara gratis
- c. Bagaiman jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat bapak / Ibu ?
boleh ada hal yang menyangkut langsung pada orang miskin

1. Nama : M. SAAD
 2. Hari / Tgl : Jum'at / 22 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Nanga Sepauh

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : HAMZAH .
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sepauk, 14-08-1939 .
 3. AGAMA : Islam
 4. ALAMAT : Desa Nanga Sepauk .
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : :
 *10 kg*
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
 Rp. *2.600*
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : *Kami merasa di bantu dan di perhatikan pemerintah*
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ? *Kalau bisa di teruskan*
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran ? *maanya kami di beri gratis*
- c. Bagaiman jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat bapak / Ibu ? *tidak usah*

1. Nama : HAMZAH
 2. Hari / Tgl : Sabtu / 23 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Nanga Sepauk

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA	: Dendan
2. TEMPAT/TGL LAHIR	: Kawangas, 18-12-1956
3. AGAMA	: Protestan
4. ALAMAT	: Desa Nanga Sepauk.

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : :
..... *10 kg*
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
Rp. *2600.*
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : *Di lanjutkan jumlah miskin*
Di tambah

 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ? *Perlu*
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran ? *Maunya kami gratis*
 - c. Bagaiman jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat bapak / Ibu ? *Sehaja aja tapi program pengantinya juga harus langsung di rasakan oleh keluarga miskin.*

1. Nama : DENDAN
2. Hari / Tgl : Sabtu / 23 Mei 2009
3. Tempat : Desa Nanga Sepauk

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : ALIT
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sei Aur, 12-04-1972
 3. AGAMA : Katolik
 4. ALAMAT : Desa Nanga Sepauk.
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : :
~~1600~~ *15 kg*
3. Berapa harga per Kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin :
 Rp. *9600*
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : *Sangat membantu kami*
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak ? *Perlu*
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebaiknya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran ? *Maunya gratis, kalau pun tidak harus dengan subsidi lagi*
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat bapak / Ibu ? *Tidak setuju*

1. Nama : Alit
 2. Hari / Tgl: Sabtu / 23 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Nanga Sepauk

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : Bodeng
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Ledawai, 27 oktober 1958
 3. AGAMA : Katolik
 4. ALAMAT : Desa Karya Jaya Kecamatan Serawai

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) sudah.....
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : kg 40 kg.....
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp 3.700,-.....
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Ya Perlu tapi untuk orang miskin saja.....
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Ya gratis lah karena kami orang miskin perlu beras yg murah.....
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Bantuan beras. Miskin bisa menolong kami untuk mendapat beras murah.....

1. Nama : BODENG
 2. Hari / Tgl : Selasa / 26 Mei 2019
 3. Tempat : Desa Karya Jaya Kec. Serawai.

- Bodeng -

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : Lena
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Mentawai, 6 February 1952
 3. AGAMA : Protestan
 4. ALAMAT : Desa Mentawai Kecamatan Serawai

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) **Ya**
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya **10 kg**
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
Rp 3.700,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : **Perlu Karena**
Sangat membantu keluarga kami
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : **Mau saja kami begitu karena**
sebagai orang miskin
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : **Tidak perlu diganti karena harga beras**
ini sangat murah dan mampu kami beli

1. Nama : LENA
 2. Hari / Tgl: Selasa / 26 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Karya Jaya Kec. Serawai



 Lena

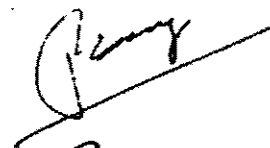
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : PANJI
2. TEMPAT/ TGL LAHIR : TAHAI, 24 Juli 1958
3. AGAMA : PROTESTAN
4. ALAMAT : DESA TAHAI PERMAI KEC. SERAWAI

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) : Sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 10 kg
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
Rp 2650,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak :
Pada diteruskan tetapi lebih baik untuk keluarga miskin saja
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Gratis lebih baik karena raskin ini memang untuk keluarga miskin atau tidak mampu.
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Doleh saja diganti programnya yang penting program tetap untuk masalah miskin.

1. Nama : PANJI
2. Hari / Tgl : Selasa / 26 Mei 2009
3. Tempat : Desa Karya Jaya Kec. Serawai.


PANJI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : SANGAH
2. TEMPAT/TGL LAHIR : Desa Kerya Jaya, 27 Mei 2009
3. AGAMA : Kristen
4. ALAMAT : Desa Kerya Jaya Kecamatan Serawai

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) : *Sudah*
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : *10 kg*
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
3.600
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu di eruskan atau tidak : *perlu*
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : *karena...ingin...beras...miskin...karena...dapat...dapat...gratis*
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : *tidak...juga...di...panti...sah...kondisi...ngg...tidak...orang...miskin*

1. Nama : SANGAH
2. Hari / Tgl : Rabu / 27 Mei 2009
3. Tempat : Desa Kerya Jaya Kec. Serawai


DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : adi
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Serawai. 16 April 1968
 3. AGAMA : Islam
 4. ALAMAT : Nanga Serawai

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / Ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya 10 kg
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp 3600,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Perlu sekali
Sangat Membantu kami orang miskin
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : kami mau sekali kalau gratis.
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : tidak usah, karena bantuan beras miskin baik sekali untuk kami.

1. Nama : ADI
 2. Hari / Tgl : Rbu / 27 Mei 2009
 3. Tempat : Desa Karya Jaya Kec. Serawai



 Adi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : DAKUN, S. SOS
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : SET. PUANG, 14-05-1962
 3. AGAMA : Kristen Protestan
 4. ALAMAT : Nanga Merakai
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) .. SUDAH ..
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : .. 15 kg / bl / kk ..
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp .. 1600 ..
Sesuai dengan Raskin Raskin
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : .. Untuk orang miskin perlu di tumbuhkan karena bantuan langsung di masyarakat ..
 - Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : .. Tidak perlu cukup dengan harga yang sudah ada ..
 - Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : .. Tidak perlu diganti karena Raskin ini langsung di subsidi oleh masyarakat yang membutuhkan ..

1. Nama : DAKUN, S. Sos
 2. Hari / Tgl : Sabtu / 30 Mei 2009
 3. Tempat : Nanga Merakai

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : RENGAN (RADES Begelany Jaya)
2. TEMPAT/TGL LAHIR : 4-9-1967
3. AGAMA : Kristen
4. ALAMAT : Nanga Lemetak
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 10 kg / bulan
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp 2100
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Tidak diteruskan
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Gratis
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Bantuan sembunyi bukan beras, Tapi bibit padi dan beri penyuluhan / pelatihan, kepada Rakyat miskin

1. Nama : RENGAN
2. Hari / Tgl : Sabtu / 30 Mei 2009
3. Tempat : Nanga Merakai



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : ESWADI
 2. TEMPAT/ TGL LAHIR : Kubau Singkal, 23 Maret 1976
 3. AGAMA : Kristen Protestan.
 4. ALAMAT : Sepan Mangiret.

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Sudah.....
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 10 kg / bln.....
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
43-500 (empat puluh tiga ribu empat ratus) (1 karung)
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) : Sangat Membantu
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Saya... Program ini Perlu di teruskan dengan catatan sisimanya tepat dan jelas.
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Mau nya sih gratis, tapi bagaimana pun harus keluar biaya, paling Endak angkos mobilisasi.
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Bagus juga sih kalau di alihkan, tapi di ganti dengan yg sifat pembudayaan.

1. Nama : ESWADI
 2. Hari / Tgl : Minggu / 31 Mei 2009
 3. Tempat : Nanga Merakai



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : Gerulan Hartono
2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sepan Mengaret, 10-08-1978
3. AGAMA : Protestan.
4. ALAMAT : Mangga Mekar, Ri 01, Desa Witalyuda.

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Ya
 2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya 18 kg
 3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp 3600/kg
 4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Perlu karena
bersentuhan langsung dengan masyarakat
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : lebih baik kalau diberikan secara gratis
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Untuk Raskin jangan diganti, Malahan kalau bisa dilambatkan dengan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat
1. Nama : GERMAN HARTONO
2. Hari / Tgl : Minggu / 31 Mei 2009
3. Tempat : Mangga Mekar

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : SUARNI
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : TH - 1952 .
 3. AGAMA : ISLAM
 4. ALAMAT : RT.04 RW 2. Kel. Kapuas Kiri Hulu
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 15 kg (lima belas kg) Per Bulan
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
Rp 2000,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Sangat perlu
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Sangat perlu diberikan secara gratis
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Raskin ini tidak perlu diganti dengan program yang lain

1. Nama : SUARNI
 2. Hari / Tgl : Rabu / 3 Juni 2009
 3. Tempat : RT.04 RW 2. Kel. Kapuas Kiri Hulu

Suari
Suarni

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : Dayang Nur
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sintang, 1943
 3. AGAMA : Islam
 4. ALAMAT : RT.07.RW.III Kel. Kapuas Kiri Hulu Kec. Sintang

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya 10 kg
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
2000,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Sangat
Perlu diteruskan
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Sangat setuju diberikan secara gratis
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Program Raskin tidak perlu diganti dengan kegiatan lain

1. Nama : DAYANG NUR
 2. Hari / Tgl : Rabu / 3 Juni 2009
 3. Tempat : RT.07 RW.III Kel. Kapuas Kiri Hulu

Dayang Nur

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : A. SIKIN
 2. TEMPAT/TGL LAHIR : Sintang TH. 1946
 3. AGAMA : Islam
 4. ALAMAT : RT. VI / RW. 2. Kel. Kluu kec. Stg
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Sudah
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 20 kg
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
2000,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : Sangat perlu diteruskan.
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : Sangat setuju diberikan secara gratis
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : Program Raskin tidak perlu di ganti dgn kegiatan lain.

1. Nama : A. SIKIN
 2. Hari/ Tgl : Kamis / 4 Juni 2009
 3. Tempat : Rt. 6 RW. II Kel. Kapus Kiri Hulu

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. NAMA : AXIAT.
2. TEMPAT/ TGL LAHIR : SIHTANG 1.7.1970.
3. AGAMA : PROTESTAN
4. ALAMAT : JL. MENSIKU RT.14 RW.04. XXXI.

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) SUDAH.....
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya : 151 LIMA.....
BELAS 1 KG PER BULAN.....
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
2.000,-.....
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
- a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : MEMURUT.....
SAYA PROGRAM INI TETAP BERLANJUT......
- b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : SEDAPAT MUNGKIN RASKIN.....
DIBERIKAN SECARA GRATIS......
- c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : SAYA SANGAT TIDAK SETUJU......

1. Nama : AXIAT
2. Hari / Tgl : Kamis / 4 Juni 2009
3. Tempat : Jln. Mensiku RT.14 RW.IV.Kel.Kapus Kiri Hulu

Axiat.

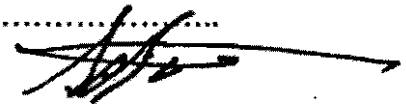
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

-
1. NAMA : SETIA
 2. TEMPAT/ TGL LAHIR : SINTANG, 1935
 3. AGAMA : ISLAM
 4. ALAMAT : RT. II/IV KEL. KLU KEC. STB.
-

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak / ibu sudah menerima atau mendapatkan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) SUDAH
2. Berapa kg Bapak / Ibu menerima Raskin per bulan jumlahnya 15 X LIMA BELAS > KG PER BULAN
3. Berapa harga per kg Bapak / Ibu bayarkan kepada petugas penyalur Raskin : Rp
2.000,-
4. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu terhadap program beras untuk keluarga miskin (Raskin) :
 - a. Apakah program Raskin ini perlu diteruskan atau tidak : MENCURUT
SAYA PROGRAM INI TETAP BERLANJUT
 - b. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu sebainya Raskin ini, apa perlu diberikan secara gratis tanpa pembayaran : SEDAPAT MUNGKIN RASKIN DIBERIKAN SECARA GRATIS
 - c. Bagaimana jika program Raskin ini diganti dengan kegiatan lain sesuai pendapat Bapak / Ibu : SAYA SANGAT TIDAK SETUJU.

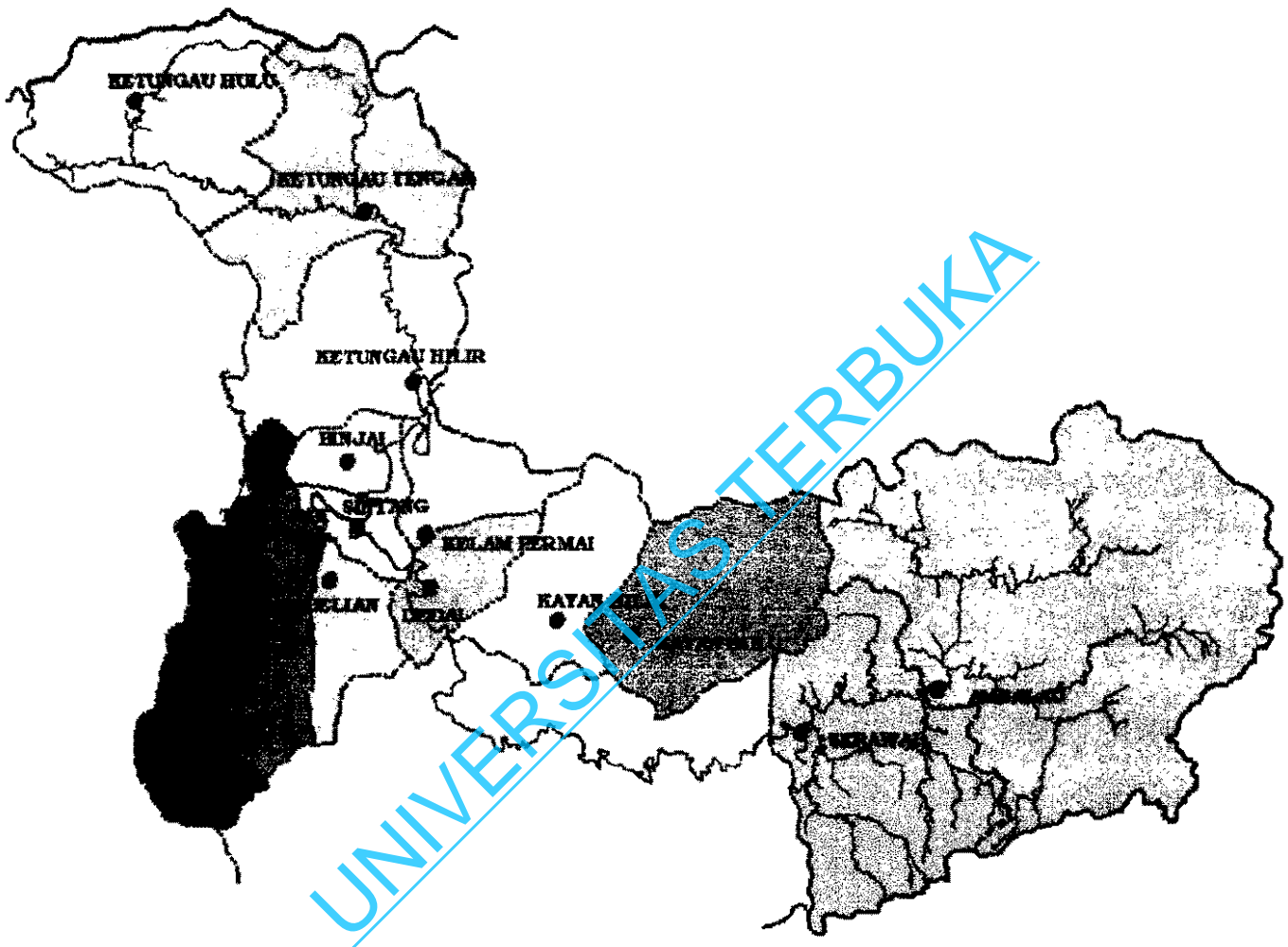
-
1. Nama : SETIA
 2. Hari / Tgl : Kamis / 4 Juni 2009
 3. Tempat : RT. II/IV. Kel. Kapuas Kiri Hulu



Lampiran 5: Daftar Nama Informan

	Nama Informan	Jabatan
1	Syarif Alwi, SH	Kepala PERUM BULOG Sub Divre Wilayah III Sintang
2	Buyung Sukowati, S.Ip.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang
3	Ir. Zulkarnaen, M.Si.	Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang
4	H. Sudirman, S.Sos, M.Si.	Camat Sintang
5	Hendrika, S.Sos, M.Si.	Camat Kelam Permai
6	Drs. Soepomo, M.Si.	Camat Dedai
7	Hefni Mochtar, S.Sos.	Camat Tempunak
8	TE Sanden, S.Sos, M.Si.	Camat Sungai Tebelian
9	Valentinus, S.Sos, M.Si.	Camat Sepauk
10	Ulidal Muchtar, S.Sos.	Camat Kayan Hilir
11	Abdul Syufriadi, SH, M.Si.	Camat Kayan Hulu
12	Octavianus Harsumpeda, S.Sos.	Camat Serawai
13	FX Murniyanto, S.Sos.	Camat Ambalau
14	Indra Cahya, S.Sos.	Camat Binjai Hulu
15	Helmi Aswandi, S.Sos.	Camat Ketungau Hilir
16	Agus Jam, S.Sos.	Camat Ketungau Tengah
17	Gambang, S.Sos.	Camat Ketungau Hulu
18	Suparman, S.Sos.	Kepala Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang
19	Lambertus Jabang	Kepala Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai
20	Samson	Kepala Desa Emparu Kecamatan Dedai
21	Rupinus Unol	Kepala Desa Guring Mali Kecamatan Tempunak
22	M. Kiat	Kepala Desa Nobal Kecamatan Sungai Tebelian
23	Liu Kim Thung	Kepala Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk
24	Jamhirudin	Kepala Desa Melingkat Kecamatan Kayan Hilir
25	Efendi	Kepala Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu
26	Zais	Kepala Desa Pagar Lebata Kecamatan Serawai
27	Ambuk	Kepala Desa Nanga Kemangai Kecamatan Ambalau
28	Daniel	Kepala Desa Mensiku Kecamatan Binjai Hulu
29	Binhon	Kepala Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir
30	Lunjun	Kepala Desa Swadaya Kecamatan Ketungau Tengah
31	Along Subard	Kepala Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu
32	Tokok	Penerimaan manfaat
33	M.Amin	Penerimaan manfaat
34	Herman	Penerimaan manfaat
35	Iswandi	Penerimaan manfaat
36	Hendrikus	Penerimaan manfaat
37	Ny. Kahadijah	Penerimaan manfaat
38	Ny. Margareta	Penerimaan manfaat
39	Husni	Penerimaan manfaat
40	Bujang	Penerimaan manfaat

Lampiran 6: Peta Wilayah Kabupaten Sintang





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Universitas Terbuka
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

14/41156.pdf

Alamat : Jalan Karya Bhakti II
Pontianak - 78121
Telp : 0561-736107,730291,760791
Fax : 0561-736107
Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)


Yth : Sekretaris Daerah
Kab. Sintang

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	Drs. H. Zulkifli	014946249	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009
A.n. Kepala UPBJJ-UT Pontianak
Kastubhag Tata Usaha

RAMWANTI, S.I.P.
UPBJJ-UT PONTIANAK 131/790 876



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007
SINTANG - 78811

14/41156.pdf

SURAT IZIN BUPATI SINTANG
NOMOR : 070 / 64 / KESRA / 2009

TENTANG

IZIN PENELITIAN

BUPATI SINTANG,

Berdasarkan : Memperhatikan Surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak Nomor, 0296/H31.43/AK/2009 tanggal 4 April 2009, Perihal Izin penelitian TAPM (Tugas Akhir Proqram Magister) / Tesets di Pemda Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, maka dengan ini :

MENGIZINKAN :

Nama : Drs. H. ZULKIFLI, HA
N I M : 014946249
Program Kekhususan : Magister
Untuk : Melakukan Riset/ Penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister)

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Unit Kerja dimana Penelitian dilakukan.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud/ tujuan yang sebenarnya.
3. Harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sintang Up. Bagian Kesra Setda Kab Sintang.
5. Surat Pemberitahuan Penelitian Ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 29 April 2009



Tembusan :

1. Bapak Bupati Sintang di Sintang
2. Rektor Universitas Terbuka Pontianak .
3. Camat Sintang.
4. Yang bersangkutan.



FOTO I
WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN EKBANG SETDA
KAB SINTANG



FOTO II
WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA



FOTO III
WAWANCARA DENGAN KEPALA PERUM BULOG KAB SINTANG



FOTO IV
WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN EKBANG SETDA
KAB SINTANG



FOTO I
WAWANCARA DENGAN PENERIMA MANFAAT



FOTO II
WAWANCARA DENGAN LURAH



FOTO III
WAWANCARA DENGAN KADES



FOTO IV
WAWANCARA DENGAN PENERIMA MANFAAT



FOTO I
PENDISTRIBUSIAN RASKIN MELALUI SUNGAI



FOTO II
PENGELUARAN RASKIN DARI GUDANG DOLOG



FOTO III
PENDISTRIBUSIAN RASKIN KE KECAMATAN AMBALAU



FOTO IV
PENDISTRIBUSIAN RASKIN KE KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN



FOTO I
PENDISTRIBUSIAN RASKIN MELALUI JASA DARAT KE KECAMATAN
KAYAN HULU

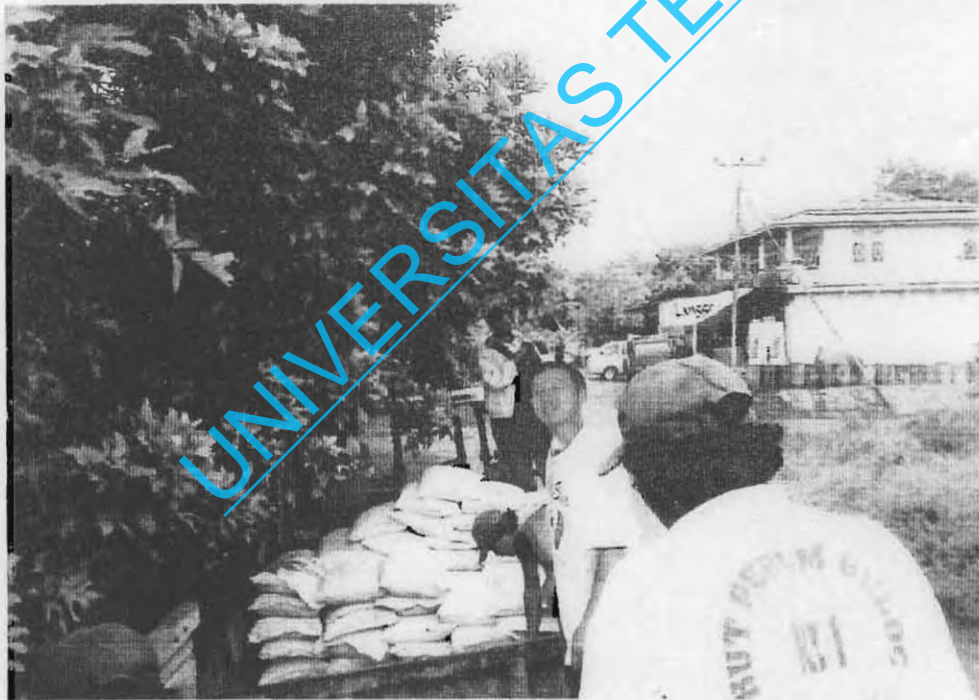


FOTO II
PENDISTRIBUSIAN RASKIN KE KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : **Drs. H. ZULKIFLI HA**
NIM : 014946249
Tempat dan Tanggal Lahir : Sintang, 12 Februari 1954
Registrasi Pertama : 2007.2
Riwayat Pendidikan : 1. Tamat SDN Negeri No. 4 Sintang Tahun 1967
2. Tamat SLTP Negeri No. 2 Sintang Tahun 1970
3. Tamat SLTA Negeri 1 Sintang Tahun 1973
4. Tamat APDN Pontianak Tahun 1977
5. Tamat S-1 Fisipol Universitas Brawijaya Malang Tahun 1992
6. Masuk Program S-2 MAP UT Tahun 2007.2
Riwayat Pekerjaan : 1. Staf Kantor Bupati Sintang Tahun 1978-1979
2. Pj. Menteri Polisi Pamong Praja Tahun 1979-1982
3. Pjs. Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Kantor Bupati Sintang Tahun 1982-1984
4. Pj. Camat Sokan Tahun 1984-1988
5. Pj. Camat Sepauk Tahun 1988-1990
6. Pj. Camat Sintang Tahun 1993-1998
7. Kabag Tata Pemerintahan Tahun 1998-2005
8. Kepala Kantor Kesbang Linmas Tahun 2005-2006
9. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Sintang Tahun 2006-2009
10. Asisten Tata Pemerintahan (Asisten I) Setda Kabupaten Sintang Tahun 2009 sampai saat ini
Alamat Tetap : Jl. Lintas Melawi No.32 Sintang
78611 Kalimantan Barat
Telp. / HP : 08125721917

Sintang, 12 Desember 2009



Drs. H. ZULKIFLI HA
NIM. 014946249